



Diplomasi PARLEMEN Memulihkan **Myanmar** Menjaga **ASEAN**

Made Fitri Maya Padmi, dkk



Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
2024



Diplomasi PARLEMEN Memulihkan Myanmar Menjaga ASEAN

Made Fitri Maya Padmi, dkk

Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
2024

DIPLOMASI PARLEMEN

Memulihkan Myanmar, Menjaga ASEAN

Pengarah

Dr. H. Fadli Zon, SS., M.Sc (Ketua)
Ghilang Dhielafararez, SH, LLM
Putu Supadma Rudana, M.B.A.
Dr. H. Sukamta, Ph.D
Ir. H. A. Hafisz Thohir.

Koordinator

Endah T.D. Retnoastuti, S.S., M.Phil

Penyunting

Salim Shahab & Den Setiawan

Penulis

Made Fitri Maya Padmi, M.Sc.
Tide Aji Pratama, M.Si.
Mochamad Ilyas, M.A.
Masyithoh Annisa Ramadhani, M.A.
Isep Parid Yahya, M.Sc.
Keanu Arief Triputra Ramadhana Trisulo, BA (Hons.), LLM
Anindita Kusuma Listya, MPP.
Heriyono Adi Anggoro, M.Hum.

Riset dan Data

Warsiti Alfiah, S.IP, DESS (Ketua)
Rd. Anne Widyana, S.S., M.Si
Andam Perwitasari, SIP, MIP
Refaini Hasna Ghassani, SH

Desain Cover & Isi

Hendra Adrian

Penata Letak

Rindias Mega Rahmawati, A.md

Sekretariat

Siti Nur Aidah, SAP, MAP
Ahmadi
Sigit Fitriyanto

ISBN

978-602-8722-72-8
978-602-8722-73-5 (PDF)

Hak Cipta 2024, Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional

Diterbitkan oleh:

Sekretariat Jenderal DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, 10270

Dikeluarkan oleh:

Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Parlemen Regional
Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional

Foto Cover:

Freepik, Vecteezy Diolah

Cetakan Pertama, September 2024

Kata Pengantar

Alhamdulillah, akhirnya buku berjudul *Diplomasi Parlemen: Memulihkan Myanmar, Menjaga ASEAN* ini dapat kami selesaikan. Buku ini merupakan buku kedua yang membahas khusus tentang peran diplomasi DPR RI terkait krisis kemanusiaan yang terjadi di suatu negara. Yang pertama terkait krisis kemanusiaan di Palestina dan buku yang sedang Anda baca ini membahas krisis kemanusiaan di Myanmar.

Seperti halnya krisis kemanusiaan di Palestina, krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar telah terjadi begitu lama dan sampai sekarang masih belum menemukan solusinya. Apa yang dialami mereka merupakan krisis kemanusiaan yang sudah menjadi kejahatan internasional yang dilakukan secara sistematis oleh suatu negara. Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warganya, sedangkan etnis Rohingya merasa Rakhine State, tempat mereka tinggal, merupakan tanah leluhurnya juga karena nenek moyang mereka sudah tinggal di sana setidaknya sejak abad ke-15.

Nasib etnis Rohingya makin buruk setelah terjadi kudeta militer pada 1 Februari 2021. Kudeta itu telah menimbulkan kekacauan tersendiri di dalam negeri Myanmar yang memicu

terjadinya perang saudara. Kekacauan politik di sana membuat parlemen Myanmar hasil pemilu November 2020 membentuk Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) di luar negeri untuk menentang junta militer yang berkuasa pasca-kudeta. CRPH kemudian mendirikan pemerintahan National Unity Government of the Republic of the Union of Myanmar (NUG) di pengasingan.

Gagasan penyelesaian konflik internal di negara itu sudah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk ASEAN melalui platform sentralitas ASEAN. Namun, platform itu belum menghasilkan solusi terbaik karena berhadapan dengan hambatan keputusan yang harus diambil melalui konsensus. DPR RI sebagai lembaga parlemen juga menjalankan peran dan fungsi diplomasi parlemennya untuk ikut menyelesaikan konflik tersebut. Namun, sama halnya dengan yang dialami pemerintah negara-negara ASEAN, upaya yang ditempuh parlemen ASEAN melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), juga terbentur platform sentralitas ASEAN yang harus diputuskan dengan konsensus.

Buku ini membahas akar permasalahan yang terjadi di Myanmar sejak beberapa abad lalu yang menyebabkan etnis Rohingya tidak diakui di negaranya sendiri (setidaknya berdasarkan keyakinan etnis Rohingya) serta beragam upaya penyelesaiannya. Tanpa pengakuan pemerintah Myanmar, etnis Rohingya menjadi komunitas *stateless* terbesar di dunia yang keberadaannya tersebar di berbagai negara. Buku ini



juga menggambarkan bagaimana DPR RI, terutama melalui alat kelengkapan DPR RI, yakni BKSAP, terus berupaya mendorong solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik internal Myanmar.

Diharapkan buku ini menjadi referensi yang memadai mengenai upaya-upaya yang dilakukan BKSAP, DPR RI, ASEAN, dan organisasi internasional lainnya dalam mencari solusi untuk penyelesaian krisis di Myanmar, khususnya etnis Rohingya. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan buku ini. Semoga bermanfaat.





FOTO: VECTEZY

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
----------------------	-----

BAGIAN I:

MYANMAR - JUNTA - ROHINGYA

01. Krisis Kemanusiaan di Rakhine.....	3
02. Nasib Tragis Etnis Rohingya.....	19
03. Kudeta 1 Februari 2021	43
04. Krisis Myanmar Tantangan Besar ASEAN.....	63

BAGIAN II:

KIPRAH DPR DI ISU MYANMAR

05. Menggugat Sentralitas ASEAN	71
06. Menjangkau Parlemen Myanmar yang Terasing	93
07. Jalan Terjal Diplomasi DPR tentang Krisis di Myanmar	111

BAGIAN III:

MYANMAR DAN PERTARUHAN ASEAN KE DEPAN

08. Pertaruhan Kredibilitas ASEAN	125
09. Tahun-Tahun Menentukan	133

Referensi	139
-----------------	-----



[HTTPS://WWW.ALJAZEERA.COM/NEWS/2024/7/22/MYANMAR-S-](https://www.aljazeera.com/news/2024/7/22/myanmar-military-chief-named-acting-president)
[MILITARY-CHIEF-NAMED-ACTING-PRESIDENT](https://www.aljazeera.com/news/2024/7/22/myanmar-military-chief-named-acting-president)



FOTO: [HTTPS://WWW.IRRAWADDY.COM/NEWS/BURMA/MYANMAR-JUNTA-SLAMSGLOBAL-CONDEMNATION-ON-ANNIVERSARY-OF-ROHINGYA-GENOCIDE.HTML](https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-slams-global-condemnation-on-anniversary-of-rohingya-genocide.html)

BAGIAN



Myanmar – Junta – Rohingya



FOTO: [HTTPS://WWW.HEW.ORG.ID/NEWS/2023/09/29/FUTURE-BANK-FACHINGKA-BANGADESH-MYANMAR](https://www.hew.org.id/news/2023/09/29/future-bank-fachingka-bangladesh-myanmar)

01 Krisis Kemanusiaan di Rakhine

Permasalahan yang dialami etnis Rohingya yang menimbulkan krisis kemanusiaan di Myanmar masih menjadi isu yang cukup pelik untuk dicarikan jalan keluarnya hingga kini. Ada kesenjangan solusi antara yang ditawarkan pihak internasional sebagai penengah dengan solusi yang diinginkan pemerintah Myanmar.

Sebelum menelisik isu krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine yang dulu bernama Arakan, tidak bisa tidak, harus juga dibahas tentang jejak sejarah Myanmar (sebelumnya bernama Burma yang tahun 1989 berganti nama menjadi Myanmar) secara umum. Diharapkan pembahasan tersebut, meski selintas, dapat memberikan konteks dan relevansi dalam upaya memahami situasi di negeri yang berjudul *The Land of The Golden Pagoda* tersebut. Tidak jauh berbeda dengan sejarah negara-negara lainnya di kawasan, Burma diperintah oleh berbagai kerajaan atau kekaisaran dari beberapa dinasti.

Asal Mula Etnis Rohingya

Tanah Arakan terletak di barat daya Myanmar berbatasan dengan Teluk Benggala. Ujung barat laut berbatasan dengan Bangladesh. Yang menyebabkan posisinya strategis karena berhadapan langsung dengan Teluk Benggala, yang merupakan jalur perdagangan kuno. Karena posisinya yang strategis, Arakan berkembang melalui proses rumit yang ditandai dengan seringnya terjadi invasi dan kontra-invasi selama ribuan tahun. Ada banyak catatan sejarah tentang invasi dan kontra-invasi antara Arakan dan entitas politik tetangganya.

Selama ribuan tahun, banyak dinasti tetangga menyerang Arakan. Arakan juga menyerang banyak tetangga seperti Kerajaan Chattogram (Bangladesh) dan Kerajaan Pegu (Burma). Melalui invasi dan kontra-invasi ini, banyak migrasi massal terjadi dan melalui ini kelompok etnis dan komposisi penduduk terbentuk di Burma dan Arakan. Dengan kondisi tersebut, tidak mengherankan jika Arakan pernah dikuasai kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang terjadi secara silih berganti.¹

Tidak jelas siapa yang pertama kali menghuni wilayah itu. Pihak Myanmar menganggap suku Rakhine adalah penduduk asli Arakan. Oleh karena itu, nama Arakan diganti menjadi Rakhine pada tahun 1974.² Sementara orang-orang Rohingya

1 Sarwar J. Minar & Abdul Halim. (2020, September). The Rohingyas of Rakhine State: Social Evolution and History in the Light of Ethnic Nationalism. *Social Evolution & History*, Vol. 19 No. 2. DOI: 10.30884/seh/2020.02.06.

2 Nur Janti. (2017, 4 September). Aung San Suu Kyi Menulis Sejarah Arakan. *Historia.id*. <https://historia.id/agama/articles/aung-san-suu-kyi-menulis-sejarah-arakan-PdWY0/page/1>.



menganggap mereka juga merupakan penduduk asli Arakan. Mereka menganggap sebutan Rohingya berarti orang asli Rohang. Rohang adalah nama lama Arakan. Nama Arakan banyak muncul pada abad ke-13 dengan beragam sebutan yang diberikan oleh para petualang dan ahli geografi saat itu, seperti Rakhuin, Rahan, Rachani, Rakanj, dan sebagainya.³ Banyak yang yakin nama Arakan berasal dari bahasa Arab. Disebutkan pula bahwa asal mulanya adalah kata *al-Rukn* yang artinya pilar, mengacu pada lima rukun Islam.⁴

Namun, siapa yang pertama menghuni Arakan? Tokoh pergerakan Myanmar, Aung San Suu Kyi, menyebutkan dari mana asal orang Arakan. “Orang-orang Arakan agak gelap asal usulnya. Diperkirakan mereka merupakan campuran orang Mongol dan Arya yang datang dari India. Dapat dipastikan bahwa para raja Arakan dahulu keturunan India,” tulisnya dalam buku *Let’s Visit Burma*.⁵

Arakan “ditemukan” oleh para pelaut Hindu dari India yang sedang mencari barang dagangan berupa emas dan perak. Mereka tiba di wilayah itu pada abad pertama Masehi, lalu mendirikan kerajaan Hindu. Kerajaan Hindu bertahan hingga abad kesepuluh melalui beberapa dinasti. Pada periode selanjutnya terjadi gelombang migrasi penduduk Buddha aliran Hinayana dari India setelah terjadi ketegangan

3 Aman Ullah. (n.d.). Etymology of Arakan & Rohingya. *Rohingya Culture Memory Center*. https://rohingyaculturalmemorycentre.iom.int/multimedia/files/pdf/download_area/Etymology_of_Arakan_and_Rohingya.pdf.

4 Ridwan Bustamam. (2013). Jejak Komunitas Muslim di Burma: Fakta Sejarah yang Terabaikan. *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2013, hal. 309 - 338.

5 Nur Janti. (2017, 4 September). Aung San Suu Kyi Menulis Sejarah Arakan. *Historia.id*. <https://historia.id/agama/articles/aung-san-suu-kyi-menulis-sejarah-arakan-PdWY0/page/1>.

antara Hindu dan Buddha di sana. Penduduk Buddha India mengungsi ke timur hingga sampai di Arakan dan mendapat perlindungan dari raja setempat yang beragama Hindu.⁶

Sedangkan Islam masuk ke sana menjadi agama penduduk setempat pada abad ke-13. Akan tetapi, pedagang Muslim Arab sebenarnya sudah masuk ke sana untuk singgah dan mencari bahan dagangan sejak pertengahan abad ke-7. Perdagangan bangsa Arab meluas sampai ke Andaman, pantai Arakan, Malaya, Sumatera, dan Jawa mulai kisaran waktu itu. Mereka diterima di daerah-daerah ini tanpa gejolak politik selama berabad-abad. Pada tahap berikutnya terjadi asimilasi antara pedagang Arab dengan penduduk setempat, termasuk di Arakan.⁷ Di Arakan komunitas Muslim kelak berkembang menjadi etnis yang sekarang disebut Rohingya.

Pada tahun 1044 Arakan diinvasi Kerajaan Burma yang kemudian menguasai Arakan hingga tahun 1287. Pada periode akhir kekuasaan kerajaan itu, Arakan diinvasi tentara Kesultanan Turki dan Kesultanan Bengal (Benggala Timur, yang kelak menjadi Bangladesh) pada tahun 1277. Kemudian diinvasi tentara Mongolia pada tahun 1275-1285. Mongolia tidak hanya menginvasi Arakan, tetapi juga Burma.⁸ Setelah diinvasi Mongolia, Burma pecah menjadi beberapa kerajaan kecil seperti Kerajaan Awa, Kerajaan Pegu Hanthawadi, Kerajaan Mrauk-U, dan negara-negara orang Shan.

6 Ridwan Bustamam. (2013). Jejak Komunitas Muslim di Burma: Fakta Sejarah yang Terabaikan. *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2013, hal. 309 - 338.

7 Ibid.

8 Sarwar J. Minar & Abdul Halim. (2020, September). The Rohingyas of Rakhine State: Social Evolution and History in the Light of Ethnic Nationalism. *Social Evolution & History*, Vol. 19 No. 2. DOI: 10.30884/seh/2020.02.06.



Posisi Rakhine di antara Myanmar dan Bangladesh



Salah satu dari kerajaan itu, Kerajaan Mrauk-U, berkuasa di Arakan. Sedangkan Kerajaan Pegu terus berkembang dan menguasai Burma. Dengan kekuasaan yang terus berkembang Kerajaan Pegu menyerang Kerajaan Mrauk-U pada tahun 1404 hingga rajanya, Nrameikhla, mengungsi ke Kesultanan Bengal. Sekitar 25 tahun kemudian Nrameikhla berhasil merebut kembali daerah kekuasaannya berkat bantuan

tentara dari Kesultanan Bengal. Meskipun berkuasa kembali di Arakan, wilayah itu menjadi bagian dari Kesultanan Bengal pada periode 1430 hingga 1785.⁹ Sebagai bagian dari suatu kesultanan, Narameikhla dan sejumlah pejabatnya mendapat gelar Islam kendatipun seorang Buddhis. Ia, misalnya, mendapat gelar Suleiman Shah. Pada periode ini penduduk Muslim bertambah secara signifikan di Arakan. Pada saat itu Arakan dikenal sebagai kerajaan Islam (bagian dari Kesultanan Bengal).

Setelah cukup lama menjadi bagian Kesultanan Bengal, pada 1784 Raja Bodawpaya dari Dinasti Konbaung yang menguasai Burma menginvasi dan menaklukkan Arakan. Arakan pun kembali dikuasai Burma. Orang-orang Muslim Rohingya diusir dan dieksekusi. Sebagian dari mereka, sekitar 35.000 orang, melarikan diri ke Bengal.¹⁰ Ini adalah awal orang-orang Rohingya terusir dari Arakan.

Dinasti Konbaung berkuasa di Burma pada periode 1752-1885 setelah menyatukan kembali Burma dan menguasai Arakan sejak 1784. Pada penguasaan raja terakhirnya, Raja Bagyidaw, mereka berperang melawan Inggris. Burma jatuh di bawah jajahan Inggris sejak 1 Januari 1886 hingga 20 Mei 1942.¹¹ Di bawah penguasaan kolonial Inggris, orang-orang Rohingya kembali ke Arakan karena dianggap bisa bekerja

9 Imtiyaz Yusuf. (n.d.). Islam di Myanmar: Bacaan Pengantar. Program Program Magister Agama dan Lintas Budaya - UGM. <https://crcs.ugm.ac.id/islam-di-myanmar-bacaan-pengantar/>.

10 European Foundation for South Asian Studies (EFSAS). (2018, Mei). *The Rohingya Issue – Its wider ramifications for South Asia*. <https://www.efsas.org/publications/study-papers/the-rohingya-issue-%E2%80%93-its-wider-ramifications-for-south-asia/>.

11 Myanmar National Portal. (n.d.). A brief history of Myanmar. <https://www.myanmar.gov.mm/web/guest/history>.



dengan baik. Burma sempat dikuasai Jepang pada 1942-1945, tetapi Inggris kembali menguasai negeri itu hingga tahun 1948.

Burma Merdeka

Berakhirnya penjajahan Inggris atas Burma tidak lepas dari gerakan nasionalisme menentang penjajah Inggris yang menggeliat di kalangan terdidik Myanmar. Di Universitas Rangoon muncul gerakan *Thakin* yang bermakna 'tuan'. *Thakin* sendiri dalam bahasa Burma merupakan panggilan yang harus digunakan oleh orang Burma saat berbicara dengan orang Inggris. Pada tahun 1940, sebelum kemerdekaan, sekelompok *Thakin* Burma yang dipimpin oleh Aung San berangkat ke Jepang untuk menerima pelatihan militer sebagai persiapan perjuangan anti-kolonial melawan Inggris.¹² Kelompok ini kemudian dikenal sebagai *Thirty Comrades*, dan kembalinya ke Burma pada tahun 1941 mereka membentuk Tentara Kemerdekaan Burma (BIA) untuk berperang melawan Sekutu.

Setelah mereka berhasil merebut Rangoon pada tahun 1942, Jepang kemudian mendirikan negara boneka, Negara Burma, dan mereorganisasi BIA menjadi angkatan bersenjatanya, Tentara Nasional Burma (BNA).¹³ Seiring berjalannya waktu, Aung San, salah satu dari *Thirty Comrades*, skeptis terhadap kemampuan Jepang untuk memenangkan perang dan niat Jepang untuk benar-benar melepaskan Burma menjadi negara

12 Martin Smith. (1991). *Burma: Insurgency and the politics of ethnicity* (1st ed.). London and New Jersey: Zed Books.

13 Oliver Hensengerth. (2005). *The Burmese Communist Party and the State-to-State Relations between China and Burma*. Leeds East Asia Papers. Archived from the original (PDF) on 28 May 2008.

merdeka yang berdaulat. Pada pertengahan tahun 1944 ia menghubungi Lord Louis Mountbatten, komandan Sekutu di Asia Tenggara, untuk menawarkan kerja sama. Pada bulan Maret 1945, Aung San dan tentaranya —yang berganti nama menjadi Tentara Nasional Burma (BNA)— bergabung dengan pihak Inggris.



Insiden pembunuhan Aung San secara jelas menggambarkan betapa runcingnya permusuhan politik internal Burma, bahkan sejak awal pembentukan negara tersebut.

Selanjutnya, Aung San dan para *Thakin* membentuk koalisi partai politik yang disebut Organisasi Anti-Fasis, yang kemudian organisasi tersebut berganti nama menjadi Liga Kebebasan Rakyat Anti-Fasis (AFPFL). AFPFL mendapat dukungan luas dari rakyat Burma. Setelah kekalahan Jepang di Burma pada bulan Mei 1945, pemerintahan militer Inggris dan mantan anggota pemerintahan Burma yang telah kembali dari pengasingan menuntut agar Aung San diadili sebagai pengkhianat. Namun, Mountbatten menyadari sejauh mana pengaruh Aung San terhadap BNA dan masyarakat umum, dan ia pun buru-buru mengirim Sir Hubert Rance yang lebih suka berdamai untuk mengepaloi pemerintahan. Rance mendapatkan kembali kepercayaan Aung San dan masyarakat umum kepada Inggris.



Ketika perang berakhir, pemerintahan militer ditarik dan Rance digantikan oleh mantan gubernur sipil yang membentuk kabinet yang terdiri dari politisi yang lebih tua dan lebih konservatif. Pemerintahan baru pun menangkap Aung San dan menuduhnya melakukan pengkhianatan. Terkejut dan marah, rakyat Burma bersiap untuk memberontak, tetapi pemerintah Inggris di London dengan bijaksana mengangkat kembali Rance, yang telah membuktikan dirinya sebagai administrator yang peka dan sukses di Burma sebagai gubernur. Rance membentuk kabinet baru, termasuk disertakan di dalamnya Aung San, dan perundingan untuk pengalihan kekuasaan secara damai pun dimulai.

Perundingan tersebut diselesaikan di London pada bulan Januari 1947 ketika Inggris menyetujui perjanjian kemerdekaan Burma. Pada bulan Juni, Burma telah memutuskan untuk meninggalkan Persemakmuran Bangsa-Bangsa Inggris. Akan tetapi, sayap komunis dan konservatif AFPFL tidak puas dengan perjanjian tersebut. Kaum komunis memisahkan diri dan bergerak di bawah tanah, dan kaum konservatif menjadi oposisi. Pada bulan Juli, Aung San dan sebagian besar anggota kabinetnya dibunuh oleh orang-orang bersenjata yang dikirim oleh U Saw, seorang pemimpin partai Myochit yang berhaluan fasis dan telah lama berseberangan dengan AFPFL. Insiden pembunuhan Aung San secara jelas menggambarkan betapa runcingnya permusuhan politik internal Burma, bahkan sejak awal pembentukan negara tersebut.¹⁴

¹⁴ David I. Steinberg, et al. (2024, 30 Agustus). The emergence of nationalism: History of Myanmar. Britannica. <https://www.britannica.com/place/Myanmar/The-emergence-of-nationalism>.

Konflik pada Masa Merdeka

Pasca-kemerdekaan, iklim politik Burma tetap mengalami gejolak. Di awal jabatannya, Perdana Menteri U Nu menghadapi banyak tantangan. Perang sipil antara pemerintah pusat dengan kelompok etnis dan kelompok komunis berkecamuk di beberapa negara bagian. Pada perkembangannya, demi menciptakan stabilitas U Nu menggandeng militer atau kerap dikenal dengan nama Tatmadaw di bawah pimpinan Jenderal Ne Win dalam upaya memaksa kelompok etnis minoritas agar tunduk kepada pemerintah pusat.

Terdapat dua kelompok oposisi terbesar di Myanmar, yaitu komunis, dipimpin oleh Partai Komunis Burma (CPB), dan nasionalis Karen, yang dipimpin oleh Persatuan Nasional Karen (KNU). CPB memulai konflik dengan pemerintah pusat pada tanggal 2 April 1948 di wilayah Bago. Sedangkan KNU memulai perjuangannya untuk bisa lepas dan mendirikan negara sendiri, mencakup wilayah Karen dan Karenni (sekarang Negara Kayin dan Negara Kayah), di Burma Hilir (Myanmar Luar). Di kemudian hari KNU mengalihkan fokus mereka dari kemerdekaan penuh ke otonomi daerah, di bawah sistem federal dengan perwakilan etnis Karen dalam pemerintahan.

Keinginan tersebut tentunya berbeda dengan sistem yang berlaku di Burma kala itu, yang dalam kurun waktu 1948–1962, Burma berada di bawah sistem pemerintahan parlementer. Namun, masa pemerintahan parlementer itu



tidak berlangsung lama karena pada tahun 1962, Jenderal Ne Win melakukan kudeta terhadap U Nu dengan dalih bahwa pemerintahannya tidak mampu mengatasi carut-marut pertikaian politik, kebijakan pemerintah yang mandeg, pemberontakan-pemberontakan, dan kemerosotan ekonomi. Rezim militer Ne Win kemudian memberlakukan penangguhan konstitusi, pelarangan partai politik oposisi, serikat mahasiswa, dan pers. Ne Win menjadikan Burma sebagai negara sosialis totalitarian dengan sistem satu partai, yaitu Burma Socialist Program Party (BSPP).

Peristiwa ini menandai dimulainya dominasi militer dalam politik Burma. Dalam 12 tahun pertama setelah kudeta oleh Ne Win, Burma menerapkan darurat militer, dan terjadi peningkatan signifikan peran militer dalam perekonomian nasional, politik, dan birokrasi negara. Pada masa inilah, secara klandestin, mulai bermunculan kelompok-kelompok etnis bersenjata lainnya yang memperjuangkan kemerdekaannya atau memperjuangkan sistem federal. Sistem pemerintahan otoriter satu partai ala Ne Win yang mengadopsi Uni Soviet ini mendapatkan penentangan besar-besaran dari masyarakat sipil sehingga mendorong terjadinya “Pemberontakan 8888” pada tahun 1988.

Burma di bawah kepemimpinan Ne Win mengalami kehancuran ekonomi yang menyulut aksi demonstrasi yang berbuntut pengunduran diri Ne Win dan digantikan Jenderal Sein Lwin. Lwin sendiri dikenal brutal dan represif. Seruan



Protes pro-demokrasi di Yangon pada bulan Agustus 1988. Foto: Bertil Lintner, (2023), *Uprisings in Myanmar—Then and Now*, The Irrawaddy.com.

aksi demonstrasi menentang pemerintah yang represif semakin meluas sehingga berujung pada tragedi penembakan pada 8 Agustus 1988 yang menewaskan lebih dari 3.000 orang. Peristiwa tersebut dikenal sebagai “8888 Uprising”, mengacu pada tanggal kejadiannya 8-8-88. Sebagai akibatnya, Lwin terus mendapatkan perlawanan dari berbagai elemen masyarakat yang memaksanya mundur dari jabatan presiden. Lwin kemudian digantikan Maung Maung, tokoh sipil yang dekat dengan militer. Namun, satu bulan kemudian internal militer mengalami kudeta yang berimbas pada pengambilan kekuasaan dari Maung Maung oleh Jenderal Saw Maung. Di bawah rezim Saw Maung, BSPP dinonaktifkan. Saw Maung



mendirikan State Law and Order Restoration Committee (SLORC), dan kemudian mengganti nama Burma dengan Myanmar pada 1989 dan mengizinkan perhelatan pemilu multi partai pada tahun 1990.

Pemilu tersebut diselenggarakan secara bebas dan adil yang dimenangkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (The National League for Democracy/NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, putri dari Aung San, yang berhasil merebut simpati rakyat Myanmar tanpa kekerasan. Namun, Tatmadaw kembali menolak keras menyerahkan tampuk kekuasaan kepada pemenang pemilu dan terus menerapkan darurat militer serta menjadikan Aung San Suu Kyi sebagai tahanan rumah sampai tahun 2010. Aung San Suu Kyi yang sudah menjadi tokoh nasional sejak “8888 Uprising” semakin populer dan kemudian menjadi ikon nasional Myanmar.

Setelah pemilihan umum tersebut, Junta Militer melakukan konsolidasi besar-besaran dan melancarkan berbagai operasi militer untuk melemahkan kelompok-kelompok etnis. Operasi tersebut berhasil dan Junta Militer mengendalikan hampir seluruh Myanmar, terkecuali beberapa wilayah kecil basis kelompok etnis yang tersisa. Junta Militer kembali memperkenalkan konstitusi baru pada tahun 2008 dan memulai periode reformasi politik dari tahun 2011 hingga 2015, dengan ribuan tahanan politik dibebaskan, termasuk Aung San Suu Kyi. Hal ini didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan stabilitas politik di Myanmar. Walaupun



Pendukung Aung San Suu Kyi. Foto: Brookings.edu/<https://www.brookings.edu/regions/asia-the-pacific/myanmar/>.

sebetulnya ini hanya taktik belaka dari militer, untuk mendelegasikan kepentingan politik dan bisnis kepada entitas partai politik pro-militer yang bernama Union Solidarity and Development Party (USDP). Taktik ini dilakukan untuk menghindari tekanan internasional atas dominasi militer yang dipandang tidak lagi relevan di era demokrasi.

Selain itu, Myanmar masih memiliki permasalahan lain yang juga tak kunjung selesai, yaitu konflik antara pemerintah pusat dengan kelompok-kelompok etnis yang ada di Myanmar. Sebagaimana kita ketahui, Kelompok Etnis Bersenjata memiliki peran yang cukup mewarnai situasi politik dan keamanan di Myanmar sejak kemerdekaan negara tersebut. Setiap kelompok etnis memiliki pasukan militernya sendiri



dan setiap kelompok memiliki tujuan politiknya masing-masing. Ada yang menginginkan kemerdekaan, ada juga yang menuntut diberlakukannya sistem federal agar mereka mendapatkan otonomi yang luas untuk mengatur dirinya sendiri.

Di antara kelompok etnis yang ada di Myanmar itulah terdapat etnis Rohingya yang menjadi salah satu fokus buku ini. Pada 9 Oktober 2016, Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) melancarkan serangan pertamanya terhadap pos-pos militer di sepanjang perbatasan Bangladesh-Myanmar, menewaskan sembilan petugas perbatasan. Peristiwa ini kemudian mendorong Junta Militer untuk memulai “operasi pembersihan” besar-besaran di negara bagian Rakhine utara, yang meningkat setelah serangan skala besar kedua oleh ARSA pada tanggal 25 Agustus 2017. Respons Junta Militer berikutnya menjadi mimpi terburuk bagi etnis Rohingya, sebagaimana yang digambarkan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia sebagai sebuah pembersihan etnis.





FOTO: [HTTPS://WWW.ALJAZEERA.COM/GALLERY/2017/9/8/NYANNAR-
THE-PERILOUS-JOURNEY-OF-ROHINGYA-REFUGEES](https://www.aljazeera.com/gallery/2017/9/8/nyannar-the-perilous-journey-of-rohingya-refugees)

02 Nasib Tragis Etnis Rohingya

Arakan atau Rakhine adalah sebuah wilayah geografis pesisir di Myanmar selatan (Burma). Wilayah tersebut meliputi sebidang tanah yang panjang dan sempit di sepanjang pantai timur Teluk Benggala dan membentang dari muara Nāf di perbatasan wilayah Perbukitan Chittagong (di Bangladesh) di utara hingga Sungai Gwa di selatan. Wilayah Arakan memiliki panjang sekitar 400 mil (640 km) dari utara ke selatan dan lebarnya sekitar 90 mil (145 km) pada titik terlebarnya. Arakan Yoma, pegunungan yang membentuk batas timur wilayah tersebut, sampai batas tertentu mengisolasi Arakan dari wilayah Myanmar selatan lainnya. Pantai Arakan tersebut memiliki beberapa pulau lepas pantai yang cukup besar, termasuk Cheduba dan Ramree. Sungai-sungai utama di wilayah tersebut adalah muara Nāf dan sungai-sungai Mayu, Kaladan, dan Lemro.

Hanya sepersepuluh dari lahan Arakan yang umumnya berbukit yang ditanami. Padi merupakan tanaman utama di daerah delta, tempat sebagian besar penduduk terkonsentrasi. Tanaman lainnya meliputi buah-buahan, cabai, dhani (jerami), dan tembakau. Vegetasi alami lereng bukit berupa hutan hijau

telah hancur di area yang luas akibat penanaman berpindah-pindah (menebang dan membakar untuk membuka lahan untuk penanaman) dan telah digantikan oleh jalinan bambu yang tidak berguna. Kota-kota utama Arakan berada di pesisir dan meliputi Sittwe (Akyab), Sandoway, Kyaukpyu, dan Taungup.

Wilayah Arakan yang dulunya hanya dapat diakses melalui laut, kini terhubung melalui udara dan jalan darat dengan wilayah lain di negara ini. Jalan yang dapat ditempuh dalam segala kondisi cuaca yang membentang melalui celah di Arakan Yoma menghubungkan Taungup dengan Pyè di Sungai Irrawaddy. Selain itu, pemerintah negara besar di sekitar seperti Tiongkok dan India memanfaatkan strategisnya Arakan untuk menjalin kerja sama dengan Myanmar membangun proyek besar. Tiongkok membangun proyek pipanisasi minyak dan gas (migas) beserta jalan raya bebas hambatan dari Arakan ke daratan mereka. Jalur logistik yang biasanya harus berputar ke Selat Malaka akan langsung dibawa dari Teluk Benggala ke daratan mereka.¹

Demikian juga India dengan proyek *Kaladan Multi Modal Transit Transport Project* yang akan menjadikan jalur logistik mereka dari India bagian timur ke India di bagian timur laut menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan Teluk Benggala dan Pelabuhan Sittwe di Arakan.² Tampak jelas bahwa Arakan atau Rakhine State memainkan peran strategis yang

1 Stefan Bepler. (2018). The Rohingya conflict: Genesis, current situation and geopolitical aspects. *Pacific Geographies*, July/August 2018.

2 India Operationalizes Sittwe Port in Myanmar. (2023, 8 Mei). *Civildaily*. <https://www.civildaily.com/news/india-operationalizes-sittwe-port-myanmar/>.



penting bagi negara-negara tetangga Myanmar. Dilihat dari sisi geografis, Arakan memiliki masa depan yang sangat cerah dan tentunya menguntungkan pendudukan Negara Bagian Rakhine.

Proyek Pipanisasi (Tiongkok) dan Kaladan Multi Modal Transit Transport Project (India)



Sumber: Stefan Bepler, (2020), "The Rohingya conflict: Genesis, current situation and geopolitical aspects" dan <https://www.civildaily.com/news/india-operationalizes-sittwe-port-myanmar/>.

Awal Penindasan terhadap Etnis Rohingya

Lantaran lokasinya yang strategis, tak ayal Arakan pernah menjadi tempat berdirinya kerajaan dan dinasti. Melihat ke masa lalu, sejarah modern Arakan dapat ditelusuri sedikitnya kepada empat era dinasti: Dhanyawaddy, Vesali, Laymro, dan Mrauk-U. Arakan berdiri sebagai negara merdeka selama lebih dari 5.000 tahun hingga ditaklukkan oleh Burma pada tahun 1784. Pada tahun 1824, Arakan dianeksasi Inggris dan dikelola

sebagai negara bagian British India oleh East India Trading Company. Setelah pendudukan tiga tahun oleh rezim fasis Jepang (1942-1945), Arakan dengan tergesa-gesa dimasukkan ke dalam Uni Burma oleh pemerintah Inggris tepat pasca-Perang Dunia II. Sejak Burma diberikan kemerdekaan pada tahun 1948, Arakan kemudian berada di bawah kekuasaan pusat rezim Burma.³

Sementara itu, suku Rohingya adalah kelompok etnis yang mayoritas beragama Islam dan telah hidup selama berabad-abad di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Saat ini, terdapat sekitar 1,1 juta warga Rohingya di Myanmar.⁴ Namun, hampir semua warga Rohingya di Myanmar tidak memiliki kewarganegaraan. Mereka tidak dapat memperoleh 'kewarganegaraan berdasarkan kelahiran' di Myanmar karena Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 tidak memasukkan Rohingya dalam daftar 135 kelompok etnis nasional yang diakui. Undang-undang tersebut secara historis telah diterapkan secara sewenang-wenang terhadap mereka. Sejak tahun 2012, pada perkembangan lainnya, diketahui terdapat serangkaian usulan yang beberapa di antaranya disahkan oleh parlemen Myanmar yang mengakibatkan pembatasan lebih lanjut terhadap hak-hak terbatas Rohingya.

Pada awal abad ke-21, etnis Rohingya diperkirakan mencakup sepertiga dari populasi di negara bagian Rakhine, dengan

3 All Arakan Students' and Youths' Congress. (n.d.). *History & Geography: Brief History of Arakan*. <https://aasyc.org/history-geography/>.

4 Who are the Rohingya? (2018, 18 April). *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/features/2018/4/18/who-are-the-rohingya>.



penganut Buddha merupakan bagian yang signifikan dari dua pertiga sisanya. Sementara itu, penggunaan istilah Rohingya sangat diperdebatkan di Myanmar. Para pemimpin politik Rohingya menyatakan bahwa mereka adalah komunitas etnis, budaya, dan bahasa yang unik jika ditelusuri asal usulnya hingga akhir abad ke-7. Namun, populasi Buddha secara umum menolak terminologi Rohingya.

Sebaliknya, mereka lebih suka menyebutnya dengan istilah Bengali dan menganggap komunitas tersebut sebagian besar terdiri dari para imigran ilegal dari Bangladesh saat ini. Selama sensus 2014 —yang pertama kali dilakukan dalam 30 tahun terakhir— pemerintah Myanmar membuat keputusan di menit-menit terakhir untuk tidak menghitung mereka yang ingin mengidentifikasi diri sebagai Rohingya dan hanya akan menghitung mereka yang menerima klasifikasi Bengali. Langkah tersebut merupakan tanggapan terhadap ancaman boikot sensus oleh penganut Buddha Rakhine.

Sejak kuartal terakhir abad ke-20, banyak warga Rohingya secara berkala terpaksa meninggalkan rumah mereka —baik ke daerah lain di Myanmar atau ke negara lain— karena kekerasan antarkomunitas antara mereka dan komunitas Buddha di negara bagian Rakhine atau, yang lebih umum, kampanye anti-Rohingya oleh tentara Myanmar. Gelombang pengungsian Rohingya yang signifikan telah terjadi pada tahun 1978, 1991–1992, 2012, 2015, 2016, dan 2017.⁵ Berdasarkan

⁵ Elaine Chan. (2024, 3 September). Rohingya. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/Rohingya>.

fakta ini, maka bisa dipastikan bahwa Rohingya telah lama mengalami persekusi dan diskriminasi yang terstruktur oleh pemerintah Myanmar dan juga oleh etnis lain.

Melihat ke belakang, komunitas Rohingya di Arakan diyakini berasal dari awal abad ke-9,⁶ ketika beberapa pedagang Arab dan Persia yang beragama Islam menemukan tempat berlindung di Arakan setelah kapal mereka tenggelam di dekat pulau Ramree. Menurut Profesor Mohammad Ali Chowdhury dari Universitas Chattogram, sudah menjadi kebiasaan lama bahwa penduduk asing dan bahkan pengunjung Burma dan Arakan, baik karena kapal karam atau karena alasan komersial,



Etnis Rohingya di Arakan dipercaya sudah ada sejak awal abad ke-9.

Foto: <https://progressivevoicemyanmar.org/2022/06/15/nothing-called-freedom-a-decade-of-detention-for-rohingya-in-myanmars-rakhine-state/>

⁶ Beberapa menyebutkan di akhir abad ke-7



didorong untuk membentuk ikatan perkawinan dengan wanita di wilayah tersebut, tetapi dengan pemahaman yang ketat bahwa ketika mereka meninggalkan negara tersebut, istri dan anak-anak mereka tidak boleh dibawa pergi bersama mereka.

Kemudian, tentara Muslim, pedagang, pencari harta, budak, dan lain-lain dari Benggala dan wilayah lain di India mulai tinggal secara permanen di Arakan dalam jumlah yang signifikan. Populasi Muslim juga terus meningkat melalui perkawinan campur dengan penduduk setempat. Oleh karena itu, cukup jelas bahwa Bangladesh dan negara bagian Rakhine di Myanmar saat ini memiliki sejarah panjang interaksi sosial dan budaya, dan alasan utamanya adalah kedekatan geografis serta keterikatan historis.

Pada tahun 1785, Raja Burma Bodawpaya merebut Arakan dan memasukkannya sebagai provinsi Myanmar. Antara tahun 1785 dan 1794, lebih dari dua pertiga penduduk Arakan termasuk Muslim Rohingya dan suku Magh Buddha melarikan diri dari Arakan untuk menyelamatkan hidup mereka akibat penyiksaan dan penindasan yang dilakukan oleh raja Burma. Mereka sebagian besar berlindung di distrik Cox's Bazar dan Bandarban saat ini. Antara tahun 1797 dan 1798, tercatat terdapat sebanyak 40 ribu pengungsi Arakan.

Di sisi lain, perusahaan Kongsi Dagang Hindia Timur Inggris mencoba meningkatkan pendapatan dan hasil produksi mereka

dengan memberikan tempat kepada para pengungsi Arakan, terutama warga Rakhine yang beragama Buddha. Nasib para pengungsi Arakan membaik setelah wilayah Arakan berada di bawah kekuasaan Inggris sesuai dengan Perjanjian Yandabo pada tahun 1826 setelah Perang Inggris-Burma Pertama (1824-1826). Kemudian, wilayah bawah Myanmar berada di bawah kendali Perusahaan Hindia Timur Inggris setelah Perang Inggris-Burma Kedua (1852-1853). Lalu, seluruh Myanmar berada di bawah kekuasaan Inggris pada akhir Perang Inggris-Burma Ketiga (1885-1887). Perkembangan politik ini berdampak besar pada arus populasi dan migrasi di wilayah tersebut, antara lain, migrasi massal orang-orang dari Benggala ke Burma dari tahun 1880-an, yang sebagian besar spontan dan sebagian didorong oleh pemerintah India Inggris.



Militer Jepang bersama dengan pasukan nasionalis Burma memasuki Arakan pada tahun 1942 dan melakukan pembunuhan besar-besaran, yang juga dikenal sebagai Pembantaian 1942 atau genosida.

Namun, situasi mulai memburuk selama Perang Dunia Kedua (1939-1945), ketika pasukan Inggris mundur setelah pendudukan Burma oleh militer Jepang. Selama masa peralihan ini, etnis Magh di Arakan yang beragama Buddha mulai membunuh orang-orang Rohingya dan



mengusir mereka ke Benggala. Kemudian terjadi kerusuhan komunal yang mengerikan antara Magh Buddha dan Muslim Rohingya di wilayah utara Arakan, ketika Arakan terbagi menjadi dua komunitas berdasarkan agama. Dalam situasi tersebut, Rohingya mendukung Inggris dan melakukan berbagai kegiatan yang menguntungkan mereka. Inggris juga menjanjikan Rohingya tanah air yang terpisah dengan mengadopsi ‘Kebijakan Pecah Belah dan Kuasai’.

Banyak etnis Rohingya bertempur di pihak Inggris dan menjadi mata-mata melawan penjajah Jepang. Ketika keterkaitan ini ditemukan, militer Jepang bersama dengan pasukan nasionalis Burma memasuki Arakan pada tahun 1942 dan melakukan pembunuhan besar-besaran, yang juga dikenal sebagai Pembantaian 1942 atau genosida. Pada saat itu, sekitar 100 ribu Rohingya terbunuh dan 500 ribu mengungsi ke India yang dikuasai Inggris, ke Melayu, Arab Saudi, dan Iran. Sejak tahun 1942, sekitar 1,2 juta Rohingya telah berlindung di Bangladesh, Pakistan, Asia Tenggara, Arab Saudi, dan negara-negara di kawasan Teluk Persia untuk menyelamatkan hidup mereka dari penyiksaan dan penindasan yang tiada henti di Arakan.

Kekuasaan Inggris di Burma dipulihkan pada akhir Perang Dunia Kedua. Namun, Inggris tidak menepati janji mereka untuk menciptakan tanah air terpisah bagi Rohingya. Bahkan pendiri Pakistan Muhammad Ali Jinnah mengkhianati tujuan mereka ketika ia menolak untuk memasukkan Arakan utara ke dalam negara baru setelah didekati oleh para pemimpin Liga

Muslim Rohingya pada tahun 1947.⁷ Kemudian, Myanmar memperoleh kemerdekaannya setelah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 1947 antara Perdana Menteri Inggris Clement Attlee dan Presiden Majelis Konstituante Burma U Nu. Pasal 3 Perjanjian Nu-Attlee menyatakan bahwa Rohingya adalah warga negara Myanmar yang sah. Di Myanmar yang merdeka, seseorang tidak diharuskan untuk menjadi bagian dari ras yang diakui secara resmi untuk menjadi warga negara. Dengan demikian, Rohingya dianggap sebagai warga negara.⁸

Pengusiran dan Eksodus Besar-besaran

Setelah kemerdekaan Burma dari British Raj (pemerintahan Kerajaan Inggris atas Asia Selatan) pada bulan Januari 1948, pemerintah di bawah Perdana Menteri U Nu membentuk Pasukan Teritorial Burma (BTF) dengan melibatkan 99% pasukan Magh Budha Arakan. Mereka melancarkan teror di utara Arakan. Ratusan pria, wanita, dan anak-anak Muslim dibantai dengan tembakan senapan mesin. Ratusan intelektual, tetua desa, dan pemimpin agama dibunuh seperti anjing dan tikus. Hampir semua desa Muslim dihancurkan rata dengan tanah. Pembantaian BTF memicu eksodus pengungsi ke Pakistan Timur saat itu, dan jumlah mereka lebih dari 50.000 orang.⁹

7 Helal Uddin Ahmed. (2019, 27 Juli). A historical overview of the Rohingya crisis. *Dhaka Tribune*. <https://www.dhakatribune.com/opinion/longform/183315/a-historical-overview-of-the-rohingya-crisis>.

8 Md Mahbubur Rahman. (2024, 9 Juli). Statelessness – the Root Cause of the Rohingya Crisis – Needs to Be Addressed. *News Lines Institutes*. <https://newlinesinstitute.org/state-resilience-fragility/statelessness-the-root-cause-of-the-rohingya-crisis-needs-to-be-addressed/>.

9 Helal Uddin Ahmed. (2019, 27 Juli). A historical overview of the Rohingya crisis. *Dhaka Tribune*. <https://www.dhakatribune.com/opinion/longform/183315/a-historical-overview-of-the-rohingya-crisis>.



Demo anti-Rohingya dilakukan oleh biksu. Mereka tidak mengakui Rohingya sebagai warga Myanmar. Foto: <https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/1990314/myanmar-cracks-down-religious-extremism-launches-task-force>.

Namun demikian, sebenarnya pernah ada secercah harapan cerah bagi nasib etnis Rohingya saat U Nu berkuasa. Ia memberikan status daerah khusus bagi Arakan utara yang diberi nama Pemerintahan Perbatasan Mayu (MFA). Selama pemerintahan U Nu, beberapa pemimpin Muslim Rohingya sempat menjabat sebagai anggota parlemen, salah satunya Sultan Mahmud, yang juga menteri kesehatan dari tahun 1960 hingga 1962 di bawah pemerintahan U Nu.¹⁰

Setelah pengambilalihan militer di Burma oleh Jenderal Ne Win pada tahun 1962, semua hak konstitusional Rohingya termasuk kewarganegaraan mereka dicabut. Selama

¹⁰ Md Mahbubur Rahman. (2024, 9 Juli). Statelessness – the Root Cause of the Rohingya Crisis – Needs to Be Addressed.

penggusuran berikutnya, sekitar 20.000 warga Rohingya melarikan diri ke Cox's Bazar, Benggala Timur (sekarang Bangladesh), dengan menyeberangi perbatasan. Pada saat itu Benggala Timur masih menjadi salah satu provinsi Pakistan dan merdeka pada tahun 1971 dengan nama Bangladesh. Namun, rezim Burma menerima kembali para pengungsi setelah berunding dengan pemerintah Pakistan. Pada tahun 1964, sejumlah organisasi sosial-budaya Rohingya dilarang oleh junta militer. Program-program yang disiarkan dalam



Eksodus manusia terbesar di Asia sejak Perang Vietnam terjadi pada bulan Agustus 2017, ketika orang-orang Rohingya melarikan diri secara besar-besaran ke Bangladesh. Insiden ini juga merupakan konsekuensi dari orang-orang Rohingya yang tidak mendapatkan status kewarganegaraan Myanmar.

bahasa Rohingya oleh Burma Broadcasting Service (BBS) dihentikan sejak Oktober 1965. Semua surat kabar swasta juga dilarang sejak tahun 1966. Terjadi eksodus Rohingya lainnya dari Arakan ke Cox's Bazar setelah perwira militer Burma memperkosa wanita Rohingya dan mendorong suku Magh Budha untuk menyerang Rohingya pada tahun 1966.



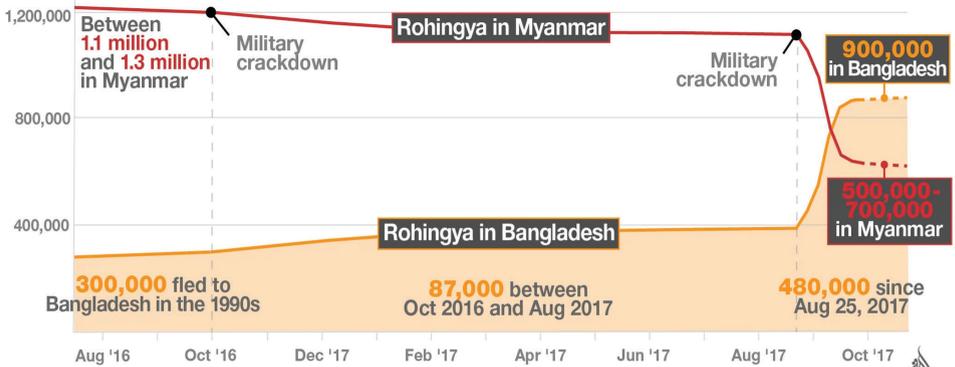
Setelah kemerdekaan Bangladesh, sejumlah besar warga Rohingya kembali melarikan diri ke negara tersebut pada tahun 1973 dan 1974 karena menghadapi penganiayaan baru oleh suku Magh Budha di Arakan. Ketika pemerintah Bangladesh memperingatkan atas konsekuensi yang mengerikan, rezim Burma terpaksa menerima kembali para pengungsi dan merehabilitasi mereka di rumah-rumah mereka di Arakan.

Namun, dalam beberapa tahun kemudian, junta militer Burma melancarkan operasi Naga Min atau Raja Naga pada tahun 1978. Lebih dari 10.000 warga Rohingya tewas selama operasi tersebut dan sekitar 250.000 pengungsi melarikan diri ke Bangladesh. Sekitar 40.000 perempuan, anak-anak, dan orang tua Rohingya tewas selama perjalanan.¹¹ Operasi Naga Min sendiri dirancang untuk memeriksa kartu registrasi kewarganegaraan Rohingya, yang memicu pengusiran pertama Rohingya pada tahun 1978. Dua gelombang pengungsi berikutnya (pada tahun 1991-1992 dan 2012), yang menyebabkan sejumlah besar Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982.

Eksodus manusia terbesar di Asia sejak Perang Vietnam terjadi pada bulan Agustus 2017, ketika orang-orang Rohingya melarikan diri secara besar-besaran ke Bangladesh. Insiden ini juga merupakan konsekuensi dari orang-orang Rohingya yang tidak mendapatkan status kewarganegaraan Myanmar.

¹¹ Helal Uddin Ahmed. (2019, 27 Juli). A historical overview of the Rohingya crisis. *Dhaka Tribune*. <https://www.dhakatribune.com/opinion/longform/183315/a-historical-overview-of-the-rohingya-crisis>.

Pengungsian Besar-Besaran ke Bangladesh pada 1990-an hingga 2017



Source: IOM, Al Jazeera, agencies
Photo: Showkat Shafi/Al Jazeera
Last updated: Sept 28, 2017



Sumber: Shakeeb Asrar, (2017, 28 Oktober), Rohingya crisis explained in maps. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2017/10/28/rohingya-crisis-explained-in-maps>.

Jurnalis majalah *Time*, Feliz Solomon, menyebut hal tersebut sebagai “eksodus orang-orang tanpa kewarganegaraan.” Walhasil, pengungsi Rohingya yang tanpa kewarganegaraan itu tidak memiliki identitas atau dokumen hukum apa pun. Kurangnya dokumentasi ini membuat mereka rentan terhadap diskriminasi. Misalnya, penyitaan tanah milik Rohingya telah meluas di Rakhine sejak tahun 1990-an. Hingga saat ini, banyak anggota angkatan bersenjata Myanmar telah menduduki tanah Rohingya tanpa memberikan kompensasi kepada pemiliknya. Ketika seorang Rohingya kehilangan tanah di Myanmar, ia menjadi ‘tunawisma’ sekaligus ‘tanpa kewarganegaraan.’

Disebabkan tidak memiliki hak kewarganegaraan, etnis Rohingya tidak bisa memiliki akses ke pendidikan,



perawatan kesehatan, atau pekerjaan, dan mereka tidak dapat berpartisipasi dalam proses politik. Tercatat lebih dari 60% anak-anak Rohingya antara usia 5 dan 17 tahun tidak pernah terdaftar di sekolah mana pun di Myanmar. Angka buta huruf di antara anak-anak Rohingya hampir 80%, karena mereka dikecualikan dari akses pendidikan formal.

Jadi, Rohingya terus melarikan diri dari negara mereka dalam menghadapi perampasan hak-hak mereka dan penganiayaan dan kekerasan yang disponsori negara. Namun, negara-negara tempat mereka berlindung –misalnya, Bangladesh, Malaysia, India, dan Pakistan– tidak mengakui Rohingya sebagai pengungsi karena status tanpa kewarganegaraan mereka.

Genosida Sistematis

Penting untuk dicatat juga nasib etnis Rohingya saat Myanmar berada di bawah rezim NLD pimpinan Aung San Suu Kyi. Digadang-gadang membawa perubahan lebih baik di bawah NLD karena Aung San Suu Kyi seorang aktivis pro-demokrasi, faktanya situasi etnis Rohingya tidak berubah. Kemenangan telak NLD pada pemilu 2015 membuat Aung San Suu Kyi menjadi penasihat negara Myanmar (setara dengan perdana menteri) dari tahun 2016 hingga 2021.

Selama periode tersebut, tepatnya pada Agustus 2017, justru militer melancarkan genosida sistematis, termasuk pembunuhan terencana dan pembakaran rumah-rumah Rohingya yang yang memaksa lebih dari 700.000 orang

mengungsi dari Rakhine.¹² Sehingga Aung San Suu Kyi dituding melakukan pembiaran atas genosida di Rakhine.

Dunia bereaksi keras terhadap ketidakmampuan Aung San Suu Kyi melindungi Rohingya dari militer. Pada akhirnya, berbagai penghargaan internasional dan label pahlawan demokrasi yang ia terima dari dunia internasional dicabut. Aung San Suu Kyi yang terkenal sebagai ikon demokrasi Myanmar itu, dianggap menerima dan membiarkan genosida terhadap Rohingya oleh militer Myanmar. Pada titik ini, baik pemerintahan sipil NLD maupun militer Myanmar, sama-sama menerima berbagai tekanan dan kecaman internasional, atas pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang dialami oleh etnis Rohingya.

Merespo^skekerasan yang menimpa Rohingya, pada November 2019, Gambia –dengan dukungan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)– mengajukan rezim Myanmar ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag. Gambia menuduh bahwa kekejaman Myanmar terhadap etnis Rohingya di Rakhine itu melanggar berbagai ketentuan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Konvensi Genosida). Pada Desember 2019, pengadilan internasional mengadakan sidang atas permintaan Gambia untuk tindakan sementara guna melindungi Rohingya yang tersisa di Myanmar dari genosida, yang diadopsi dengan suara bulat oleh pengadilan pada Januari 2020. Pada Januari 2021, Myanmar, yang saat itu berada di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh NLD

¹² Md Mahbubur Rahman. (2024, 9 Juli). Statelessness – the Root Cause of the Rohingya Crisis – Needs to Be Addressed. *News Lines Institutes*. <https://newlinesinstitute.org/state-resilience-fragility/statelessness-the-root-cause-of-the-rohingya-crisis-needs-to-be-addressed/>.



pimpinan Aung San Suu Kyi, mengajukan keberatan awal yang menantang yurisdiksi ICJ terkait kedudukan Gambia untuk mengajukan kasus tersebut.¹³

Pada Juni 2024, ICJ memutuskan dengan suara bulat menerima deklarasi intervensi yang diajukan oleh tujuh negara dalam kasus genosida terhadap etnis Rohingya yang diajukan oleh Gambia melawan rezim Myanmar. Dengan demikian, tujuh negara, yaitu Maladewa, Kanada, Denmark,



Gambia menuduh bahwa kejahatan Myanmar terhadap etnis Rohingya di Rakhine adalah genosida. Foto: <https://www.brookings.edu/articles/while-the-world-sleeps-myanmar-burns/>

¹³ Human Right Watch. (2022, 14 Februari). *Developments in Gambia's Case Against Myanmar at the International Court of Justice*. <https://www.hrw.org/news/2022/02/14/developments-gambias-case-against-myanmar-international-court-justice>.

Prancis, Jerman, Belanda, dan Inggris memungkinkan untuk berkontribusi pada proses persidangan dengan perspektif mereka tentang penafsiran ketentuan Konvensi Genosida.

Lebih lanjut, ketujuh negara tersebut diberi wewenang, sesuai dengan Pasal 86 Aturan ICJ, untuk menyampaikan pengamatan tertulis mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan intervensi mereka. Berikutnya, ICJ akan memutuskan pada tahap selanjutnya apakah ketujuh negara tersebut akan diizinkan untuk menyampaikan pengamatan mereka selama proses lisan. Pengakuan atas intervensi itu sendiri menyoroti meningkatnya minat dan keterlibatan masyarakat internasional dalam penafsiran hukum Konvensi Genosida saat ICJ melanjutkan kasus genosida di Rakhine.¹⁴

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia memperkirakan bahwa terdapat 45.000 warga Rohingya yang telah melarikan diri ke daerah di Sungai Naf dekat perbatasan dengan Bangladesh, untuk mencari perlindungan dari upaya terstruktur oleh militer dan agen-agenya yang melakukan persekusi, pembunuhan dan pengusiran terhadap lebih dari satu juta warga Rohingya yang berada Rakhine. Seorang penyintas bahkan menggambarkan melihat puluhan mayat saat ia melarikan diri. PBB juga memperingatkan bahwa ribuan nyawa tak berdosa akan hilang jika masyarakat internasional gagal menanggapi pertumpahan darah di negara bagian Rakhine.¹⁵

14 Aysu Bicer. (2024, 4 Juli). ICJ allows 7 states to intervene in Gambia's genocide case against Myanmar. *Aa.com.tr*. <https://www.aa.com.tr/en/world/icj-allows-7-states-to-intervene-in-gambias-genocide-case-against-myanmar/3265584>.

15 United Nations. (2024, 24 Mei). *Myanmar: UN rights office warns of growing crisis in Rakhine*



Menurut data terkini (Juni 2024), badan pengungsi PBB (UNHCR) mengungkapkan bahwa sekitar 226.000 orang dari komunitas Rohingya telah terusir akibat kekerasan. Lebih parah lagi, Myanmar sekarang dikenal sebagai titik rawan kelaparan.¹⁶ Untuk mendapatkan potret utuh situasi krisis kemanusiaan di Rakhine secara khusus dan Myanmar secara umum, berikut sejumlah fakta:

1. Selama puluhan tahun, warga Rohingya menghadapi penderitaan yang luar biasa di Myanmar. Mereka ditolak aksesnya terhadap kewarganegaraan dan dokumen; dicegah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja; dikurung di kamp dan desa; dan menjadi sasaran kekerasan yang luar biasa.
2. Sebagian besar pengungsi Rohingya –sekitar 1.000.000 orang– mengungsi ke kamp-kamp di negara tetangga Bangladesh sejak tiga dekade lalu dan sebagian besar mengungsi pada tahun 2017 setelah serangkaian kekerasan berskala besar dan pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi keamanan di kamp-kamp Bangladesh yang sempit telah memburuk secara signifikan selama setahun terakhir, yang mendorong beberapa keluarga Rohingya melakukan perjalanan yang sangat berbahaya untuk mencari keselamatan dan stabilitas.
3. Mayoritas warga Rohingya telah melarikan diri ke –dan diberikan status pengungsi di– Bangladesh (kurang dari

state. <https://news.un.org/en/story/2024/05/1150201>.)

¹⁶ Ibid.



Sebagian besar orang-orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Foto: <https://www.aljazeera.com/gallery/2017/9/8/myanmar-the-perilous-journey-of-rohingya-refugees>

960.000), Malaysia (lebih dari 107.000), dan India (lebih dari 22.000).

4. Karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan, tidak ada jalur hukum yang memungkinkan pengungsi Rohingya untuk bergerak di wilayah-wilayah tersebut. Akibatnya, mereka sering melakukan perjalanan berbahaya dengan perahu yang ditawarkan oleh penyelundup.
5. Perjalanan dengan perahu dapat memakan waktu berminggu-minggu, seringkali menggunakan perahu yang tidak layak laut dan tanpa makanan, air bersih, atau



sanitasi yang memadai. UNHCR juga memiliki laporan tentang kekerasan fisik dan seksual di atas perahu.

6. Pengungsi Rohingya terus mencari keselamatan melalui perjalanan berbahaya di laut karena putus asa, meskipun ada risiko. Tahun 2022 merupakan salah satu tahun paling mematikan yang pernah tercatat bagi pergerakan pengungsi Rohingya di Asia Tenggara, dengan 348 orang dinyatakan meninggal atau hilang secara tragis, termasuk anak-anak.¹⁷
7. Pada akhir tahun 2023, hampir 2,6 juta orang Myanmar telah meninggalkan rumah mereka –angka yang setara dengan lebih dari sepertiga populasi negara tetangga Laos. Situasi itu semakin memburuk. Sejak meningkatnya pertempuran pada bulan Oktober 2023, 628.000 orang Myanmar terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk menghindari ancaman seperti serangan udara dan artileri, eksekusi dan pembunuhan, perekrutan paksa, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, dan penganiayaan. Keluarga sering kali terpaksa mengungsi beberapa kali, yang membuat mereka berisiko lebih tinggi menjadi korban ranjau darat yang kini telah mencemari hampir setiap wilayah Myanmar. Banyak yang mencari perlindungan di hutan belantara, mereka kekurangan tempat tinggal dan akses ke layanan dasar seperti makanan, perawatan medis, dan air bersih.

¹⁷ UNHCR – Indonesia. (2023, 5 Desember). *14 Facts on Rohingya Refugees*. <https://www.unhcr.org/id/en/54315-14-facts-on-rohingya-refugees.html>.

8. Tercatat sekitar 18,6 juta orang Myanmar –kira-kira 1/3 dari total populasi– membutuhkan bantuan kemanusiaan. Sebelum kudeta militer pada tahun 2021, angkanya hanya 1 juta. Sementara itu, inflasi dan konflik terus menaikkan harga makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya. Seperempat dari populasi saat ini menghadapi kelaparan dan potensi penyakit karena sistem perawatan kesehatan yang runtuh. Kombinasi berbahaya ini telah menyebabkan kekurangan gizi, terutama di kalangan anak-anak, yang mengancam akan memberikan dampak negatif jangka panjang pada populasi Myanmar. Konflik yang sedang berlangsung juga telah mengganggu pendidikan. Sekitar sepertiga anak-anak di Myanmar tidak dapat mengakses pendidikan karena kurangnya akses ke sekolah atau ancaman serangan udara.

9. Militer Myanmar sangat membatasi pengiriman bantuan kemanusiaan di dalam negeri. Ini berarti bahwa organisasi kemanusiaan di lapangan menghadapi hambatan birokrasi dan lingkungan yang semakin tidak bersahabat dan berbahaya, sehingga sulit untuk menjangkau orang yang membutuhkan. Situasi bagi pekerja bantuan di negara itu telah memburuk secara dramatis sejak kudeta militer pada tahun 2021. Dalam 3 tahun terakhir saja, 40 pekerja bantuan telah terbunuh, 35 terluka, 15 diculik, dan 212 ditangkap, menurut ‘Insecurity Insight’. Meskipun tantangan



tersebut semakin meningkat, para pelaku kemanusiaan di Myanmar tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan yang menyelamatkan nyawa. Mayoritas dukungan ini saat ini diberikan oleh organisasi lokal, masyarakat sipil, dan akar rumput yang menempatkan diri mereka di garis depan untuk membantu komunitas mereka.

10. Di tengah meningkatnya keadaan darurat kemanusiaan dan perhatian media yang cepat berlalu, Myanmar dengan cepat menjadi krisis yang terlupakan. Rencana Tanggap Kemanusiaan Myanmar 2023 PBB hanya menerima sekitar sepertiga dari dana yang dibutuhkan, sehingga menyisakan kesenjangan dana sebesar \$600 juta. Ini berarti sekitar 1,9 juta orang yang rentan tidak dapat menerima bantuan yang sangat mereka butuhkan, sementara sebagian besar dari 3,1 juta orang yang menerima beberapa bentuk dukungan tidak mendapatkan cukup bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sepenuhnya.¹⁸



¹⁸ European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. (2024, 31 Januari). *5 things you need to know about Myanmar's humanitarian crisis*. https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/stories/5-things-you-need-know-about-myanmars-humanitarian-crisis_en.



Kill in Day.
Deal at night.
Lie on TV.
are Military.

We don't accept military coup

WE WANT OUR LEADER
FREE AUNG SAN SUU KYI
DEMOCRACY

WE WANT OUR LEADER
FREE AUNG SAN SUU KYI

WE WANT OUR LEADER
FREE AUNG SAN SUU KYI

WE WANT OUR LEADER
FREE AUNG SAN SUU KYI

FREE OUR LEADER
RETURN OUR
COUNTRY TO
DEMOCRACY

JOIN IN
CDM

WE WANT OUR LEADER
FREE AUNG SAN SUU KYI

WE WANT OUR LEADER
FREE AUNG SAN SUU KYI

FREE OUR LEADER
AUNG SAN SUU KYI

WE WANT OUR LEADER
FREE AUNG SAN SUU KYI

WE WANT OUR LEADER
FREE AUNG SAN SUU KYI

WE WANT OUR LEADER
FREE AUNG SAN SUU KYI

WE WANT OUR LEADER
FREE AUNG SAN SUU KYI

WE WANT OUR LEADER
FREE AUNG SAN SUU KYI

LEADER

WE WANT OUR LEADER
FREE AUNG SAN SUU KYI

WE WANT OUR LEADER
FREE AUNG SAN SUU KYI

WE WANT OUR LEADER
FREE AUNG SAN SUU KYI

WE WANT OUR LEADER
FREE AUNG SAN SUU KYI

WE WANT OUR LEADER
FREE AUNG SAN SUU KYI

WE WANT OUR LEADER
FREE AUNG SAN SUU KYI

SUPPORT CDM
MYANMAR
STOP SAVING
DICTATORSHIP

WE WANT OUR LEADER
FREE AUNG SAN SUU KYI

WE WANT
OCRACY

FCID: <https://www.aljazeera.com/> ER/12/22 2171ANMMR/001

03 Kudeta 1 Februari 2021

Di tengah upaya internasional untuk menekan pemerintah Myanmar agar melakukan repatriasi terhadap pengungsi Rohingya agar dapat kembali ke rumah-rumah mereka di Arakan, pada 8 November 2020 pemilihan umum kembali digelar. Partai National League for Democracy (NLD) kembali memenangkan pemilihan umum dan mengalahkan secara telak Union Solidarity and Development Party (USDP) yang merupakan partai politik proksi Tatmadaw.

Tidak puas dengan hasil itu, junta militer menuduh Aung San Suu Kyi, salah satu pimpinan NLD, melakukan kecurangan.¹ Tidak hanya itu, pada Senin pagi 1 Februari 2021, iring-iringan mobil berwarna hitam bergerak memasuki parlemen Myanmar. Sebuah program TV nasional yang melakukan siaran langsung dari depan pintu masuk parlemen Myanmar secara tidak sengaja menangkap momen tersebut. Tidak ada yang menyangka apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara pada saat yang bersamaan, kendaraan lapis baja dan kendaraan angkut militer terlihat diparkir di sudut-

¹ Pizaro Gozali Idrus. (2022, 26 Juli). Sejarah kudeta berdarah junta Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi. *Aa.com.tr*. <https://www.aa.com.tr/id/regional/sejarah-kudeta-berdarah-junta-myanmar-terhadap-aung-san-suu-kyi/2646006>.

sudut ibukota Naypyidaw. Militer Myanmar kemudian mengumumkan bahwa mereka telah merebut kekuasaan dan memberlakukan keadaan darurat nasional selama satu tahun. Sebuah kudeta telah terjadi, untuk kesekian kali.

Setelah mengumumkan keadaan darurat nasional, militer kemudian menahan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, para menteri, anggota parlemen, serta anggota senior dari partai berkuasa NLD hanya beberapa jam sebelum jadwal dimulainya sesi pertama parlemen baru. Mereka mengklaim tindakan tersebut dilakukan karena adanya “kecurangan pemilih” pada pemilu 8 November 2020 yang mengakibatkan dominasi partai NLD pimpinan Suu Kyi di parlemen. Klaim tersebut digunakan sebagai justifikasi untuk melakukan kudeta. Militer juga mengumumkan bahwa Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, telah dilantik sebagai presiden negara tersebut. Pemerintahan sipil Myanmar secara resmi berakhir. Demokrasi Myanmar yang rapuh itu, mengalami kemunduran terbesar.

Pihak militer mengklaim kudeta tersebut sah berdasarkan konstitusi, yang memungkinkan mereka mengambil alih kekuasaan darurat pada saat krisis nasional terjadi. Dalam pidatonya di hadapan rakyat pada tanggal 2 Februari, junta militer menggunakan kegagalan komisi pemilihan umum untuk menyelesaikan sengketa pemilu, yang menurutnya “melanggar konstitusi dan dapat menyebabkan pecahnya



solidaritas nasional”, sebagai dalih untuk mengambil alih kekuasaan. Militer mengatakan mereka akan mengadakan pemilu yang “bebas dan adil” setelah keadaan darurat berakhir.

Kekuasaan Militer dan Tindakan Represif

Militer Myanmar, Tatmadaw, memandang dirinya sebagai pelindung negara, yang mempunyai ‘kewajiban sekaligus hak’ untuk memerintah. Dengan ideologi itu, militer Myanmar memerintah negara tersebut sejak tahun 1962 hingga 2011. Kekuasaan militer (tetapi tidak sepenuhnya) berakhir pada



Blokade kendaraan militer Myanmar di depan jalan menuju gedung parlemen pada saat kudeta berlangsung. Sumber: BBC.uk.

2011 setelah ada tekanan baik dari dalam maupun luar negeri yang, antara lain, diakibatkan oleh aksi genosida yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya. Sebelum kudeta 1 Februari 2021, Myanmar diatur berdasarkan pembagian kekuasaan antara pemerintah sipil dan militer, berdasarkan konstitusi tahun 2008. Pengaturan tersebut memastikan bahwa militer tidak pernah berada di bawah kendali sipil, dengan memberikan 25% kursi parlemen, tiga jabatan penting di kementerian (pertahanan, keamanan dalam negeri, dan keamanan perbatasan) dan salah satu jabatan wakil presiden untuk militer.

Militer menyetujui pengaturan tersebut sebagai bentuk kompromi sekaligus untuk mempertahankan dominasinya dalam politik, tetapi pemilu pada bulan November 2020 menunjukkan bahwa keseimbangan telah bergeser. Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang merupakan partai sipil yang berkuasa memenangkan suara mayoritas, sementara Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang berhaluan militer—yang pernah memenangkan pemilihan umum pada tahun 2010, mendapatkan suara terburuk alias mengalami kekalahan terbesarnya.

Prospek meningkatnya kontrol demokrasi dan akuntabilitas sebagai hasil dari kemenangan besar NLD pada pemilu November 2020 kemungkinan besar mengancam kepentingan bisnis militer serta pengaruh politiknya, sehingga timbul anggapan di elite militer bahwa konstitusi 'tidak lagi menjadi



Dari kiri ke kanan: Aung San Suu Kyi (Penasihat Negara, Pimpinan NLD, tokoh pro-demokrasi Myanmar), Win Myint (Presiden Myanmar yang digulingkan militer), Jenderal Senior Min Aung Hlaing (Pimpinan Junta Militer Myanmar).

benteng yang cukup'. Banyak pengamat memperkirakan bahwa tujuan utama kudeta tersebut adalah untuk memperpanjang kekuasaan dan jaringan patronase, termasuk bisnis keluarga yang menguntungkan milik Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang akan pensiun pada bulan Juli tahun 2021.²

Di samping itu, pemilihan umum baru (setelah November 2020) diperkirakan akan memberi Min Aung Hlaing jalan menuju kursi kepresidenan jika USDP memenangkan sepertiga kursi. Kondisi itu bisa dipersiapkan dalam waktu setahun selama berlakunya Keadaan Darurat Nasional. Atau setidaknya, demikianlah yang direncanakan oleh militer. Kudeta tersebut menuai kecaman dan sanksi internasional,

² Angela Clare. (2021, 2 Juli). The Myanmar coup: a quick guide. *Parliament of Australia*. https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp2122/Quick_Guides/MyanmarCoup.



Foto: <https://www.usip.org/publications/2022/04/myanmar-coup-spurs-national-resistance-unified-nation-could-emerge>



Foto: <https://www.aa.com.tr/en/analysis/opinion-myanmar-spring-has-finally-arrived-a-decade-after-the-premature-celebration-of-an-elite-deal/2491391>



Foto: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-56149359>

Sejumlah foto yang menunjukkan aksi unjuk rasa besar-besaran dari kelompok-kelompok komunitas pro-demokrasi dan masyarakat luas yang menolak kudeta militer di jalanan Kota Yangon.



Demo mengancam kudeta 1 Februari 2021. Foto: https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_us-imposes-sanctions-after-myanmar-coup/6201872.html

tetapi militer Myanmar secara historis terbukti ‘sangat kebal terhadap pengaruh internasional’ dan kemungkinan besar akan mengabaikan tekanan ini. Min Aung Hlaing sendiri sebelumnya mendapat kecaman internasional atas dugaan perannya dalam serangan militer terhadap etnis minoritas Rohingya dan juga etnis minoritas lainnya.³

Kudeta tidak berhasil mendapatkan simpati maupun kepercayaan dari mayoritas rakyat Myanmar. Rakyat bereaksi menentang kudeta tersebut. Kurang lebih seminggu setelah militer Myanmar secara resmi mengambil alih, demonstrasi damai besar-besaran pecah di jalanan Kota Yangon. Ribuan orang tumpah ruah di jalan-jalan. Aksi yang terjadi pada

³ Ibid.

tanggal 6 Februari 2021 tersebut diikuti oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi, kelompok profesi, mahasiswa dan rakyat. Mereka menuntut pengunduran diri Min Aung Hlaing dan pembubaran Dewan Administrasi Negara (SAC) yang baru dibentuk, pembebasan mereka yang ditangkap dalam kudeta, dan pemulihan pemerintahan sipil.

Setelah tanggal 6 Februari tersebut, demonstrasi semakin meluas ke seluruh kota-kota besar di Myanmar. Para pengunjuk rasa sebagian besar menggunakan bentuk protes damai dan tanpa kekerasan, yang meliputi tindakan pembangkangan sipil, pemogokan buruh, kampanye boikot militer, gerakan memukul-mukul panci, kampanye pita merah, protes publik, dan pengakuan terhadap hasil pemilihan umum November 2020. Para pengunjuk rasa juga menggunakan warna merah yang identik dengan NLD dan mempopulerkan salam tiga jari sebagai simbol perlawanan terhadap junta militer.

Tak mendengarkan aspirasi rakyat, militer merespons penolakan rakyat tersebut dengan sangat keras. Untuk pertama kalinya sejak terjadi gelombang unjuk rasa, militer menurunkan pasukan untuk menghadapi para demonstran. Kudeta gagal menciptakan stabilitas politik. Gelombang penolakan kian meluas. Pada tanggal 14 Februari 2021 tank-tank militer diturunkan ke jalan-jalan untuk menekan para demonstran agar menghentikan aksinya. Aksi represif dan penangkapan terhadap para demonstran mulai terjadi. Militer dan polisi tidak ragu-ragu untuk menggunakan peluru tajam



dan menembak ke arah demonstran. Saluran komunikasi dibatasi, jaringan internet diputus. Kantor-kantor NLD menjadi sasaran pemantauan ketat oleh militer dan polisi.

Perlawanan Rakyat

Pada tanggal 26 Februari 2021 utusan Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, menyatakan di depan Sidang Umum PBB bahwa ia tidak mewakili pemimpin militer, tetapi NLD, dan mengatakan bahwa ia justru mewakili anggota parlemen yang dipilih secara demokratis di negara tersebut. Kyaw Moe Tun mengecam kudeta oleh militer Myanmar. Ia mengatakan bahwa dukungan yang terus-menerus dan kuat kepada rakyat adalah hal yang “sangat penting”, dan mengimbau semua negara anggota dan PBB, untuk mengutuk kudeta tersebut, dan mengambil “semua tindakan sekuat mungkin untuk menghentikan tindakan kekerasan dan brutal.” Dengan suara bergetar, usai membacakan pernyataannya di Sidang Umum PBB, dia memberi hormat tiga jari seperti yang dilakukan para pengunjuk rasa di Myanmar. Ia juga menyatakan akan bergabung dengan mereka yang terus “memperjuangkan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”⁴

Utusan Khusus PBB untuk Myanmar juga melaporkan hasil temuannya terkait dengan situasi yang berkembang di Myanmar. Dalam laporannya di depan Sidang Umum, Christine Schraner Burgener menyampaikan, mengingat

⁴ United Nations. (2021, 26 Februari). *Myanmar Ambassador to UN denounces military coup, as envoy warns democratic processes have been 'pushed aside'*. <https://news.un.org/en/story/2021/02/1085902>.



Salam tiga jari sebagai simbol perlawanan terhadap junta militer.

Foto: <https://www.aljazeera.com/gallery/2021/2/17/myanmar-coup>.

bahwa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) telah memenangkan pemilu bulan November dengan 82% suara, ia kemudian menyerukan intervensi dan tekanan terhadap junta militer agar situasi di Myanmar dapat segera dipulihkan. Ia juga menyerukan pemanfaatan saluran komunikasi kolektif maupun bilateral untuk membantu memulihkan demokrasi di Myanmar. Pada tahapan ini dunia internasional, khususnya Barat, mulai merespons terhadap situasi yang berkembang di Myanmar. Sekretaris Jenderal PBB bahkan meminta militer dan polisi Myanmar untuk menjamin hak berkumpul secara damai. Namun, militer dan polisi tak bergeming. Ratusan orang demonstran ditangkap. Tidak hanya itu, kekerasan



terhadap rakyat yang menentang kudeta oleh junta dan aparatnya semakin meluas.

Pada tanggal 28 Februari 2021, sebuah unjuk rasa dengan sebutan “White Coat Protest” yang diikuti oleh ribuan dokter, perawat, dan mahasiswa dari universitas-universitas melakukan aksi unjuk rasa menentang junta militer di Yangon. Media independen *Myanmar Witness*, melaporkan, polisi menyerang barisan demonstran dari bagian belakang dan menangkap sekitar 100 orang. Sementara media nasional Myanmar, *Irrawaddy*, melaporkan sekitar 200 orang telah ditangkap pada aksi tersebut.⁵ Pada saat yang sama, media independen juga melaporkan telah terjadi pelecehan, intimidasi, dan kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang terlibat aksi. Satu orang dikabarkan dicekik, sementara satu lainnya mengalami intimidasi dengan senjata api oleh polisi.

Masih di hari yang sama, kelompok masyarakat sipil pro-demokrasi yang menamakan dirinya “Milk Tea Alliance”⁶ disambut dengan kekerasan oleh militer pada saat melakukan unjuk rasa di jalan Insein, Yangon. Setidaknya 19 orang termasuk seorang guru tewas pada insiden tersebut. Kekerasan demi kekerasan serta penangkapan-penangkapan rakyat dan aktivis pro-demokrasi terus terjadi sepanjang bulan Februari,

5 The Road to Civil War. (2022, 29 November). *Myanmar Witness*. <https://www.myanmarwitness.org/timeline/white-coat-protests>.

6 Milk Tea Alliance adalah gerakan demokrasi dan hak asasi manusia daring yang sebagian besar beranggotakan warganet dari Hong Kong, Taiwan, Thailand, dan Myanmar. Gerakan ini awalnya bermula sebagai meme internet yang dibuat sebagai respons terhadap meningkatnya kehadiran komentator nasionalis Tiongkok di media sosial dan telah berkembang menjadi gerakan protes multinasional yang dinamis terhadap otoritarianisme dan mengadvokasi demokrasi. Selain di empat negara utama yang disebutkan, gerakan ini juga telah membangun kehadiran yang signifikan di Filipina, India, Malaysia, Belarus, dan Iran.

Maret hingga April 2021. Tanggal 27 Maret 2021 menjadi hari paling berdarah dalam sejarah Myanmar pasca-kudeta militer 1 Februari 2021. Jika sebelumnya rangkaian aksi represif aparat sebagai respons terhadap demonstrasi hanya berpusat di Yangon saja, maka pada tanggal 27 Maret 2021, sebanyak 70 orang demonstran tewas oleh aparat hanya di wilayah Mandalay saja. Kekerasan kemudian semakin meluas ke wilayah-wilayah lain di Myanmar.

Sejak terjadinya kudeta militer pada tanggal 1 Februari 2021, tindakan represif militer dalam menghadapi gelombang demonstrasi telah mengakibatkan ditangkapnya para pemimpin politik terpilih, pejabat sipil, tokoh-tokoh pro demokrasi, demonstran serta jurnalis. Sampai dengan Juni 2021, tercatat sebanyak kurang lebih 887 orang telah terbunuh, 6.000 lainnya telah ditangkap.⁷ Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Peace Research Institute Oslo menyebutkan bahwa sejak tanggal 1 Februari 2021 hingga 30 September 2022, tercatat setidaknya ada 6.337 warga sipil Myanmar dilaporkan tewas dan 2.614 terluka dalam kekerasan atau serangan bernuansa politik.⁸

Serangan-serangan yang dilakukan oleh militer tidak hanya memobilisasi demonstrasi besar-besaran dan pembangkangan sipil, tetapi juga perlawanan gerilya bersenjata. Pada tanggal 28 Maret 2021, hampir dua bulan setelah kudeta 1 Februari

7 Angela Clare. (2021, 2 Juli). The Myanmar coup: a quick guide. *Parliament of Australia*. https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp2122/Quick_Guides/MyanmarCoup.

8 Peace Research Institute Oslo. (2023). *Counting Myanmar's Dead: Reported Civilian Casualties since the 2021 Military Coup*.



Demo massa terjadi beberapa bulan dan ribuan orang dilaporkan tewas. Foto: VOA Burmese/<https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158479206338074&set=pcb.10158479209753074>.

2021, sebuah bentrokan kecil terjadi pada sebuah perkemahan kelompok pro-demokrasi di Kota Kalay di wilayah Sagaing tengah, ketika para demonstran menggunakan senjata darurat (ketapel, bom Molotov, senjata rakitan) untuk mempertahankan diri dari serangan pasukan junta militer. Peristiwa ini kemudian tercatat sebagai kejadian pertama perlawanan sipil bersenjata terhadap tindakan represif dan kejam militer terhadap pengunjuk rasa damai sejak kudeta 1 Februari 2021.⁹ Menyusul kejadian tersebut, perlawanan bersenjata semakin tereskalasi dan meluas. Pada akhir Maret 2021, puluhan pengunjuk rasa dikabarkan pergi ke daerah-daerah perbatasan untuk mendapatkan pelatihan militer dari kelompok-kelompok etnis bersenjata. Myanmar diambang perang saudara.

⁹ Ye Myo Hein. (2024, 30 April). Nine Things to Know About Myanmar's Conflict Three Years On. *United States Institute of Peace*. <https://www.usip.org/publications/2024/04/nine-things-know-about-myanmars-conflict-three-years>.

Perang Saudara Memperburuk Nasib Rohingya

Meningkatnya kekerasan di Myanmar diperkirakan telah memaksa 230.000 orang meninggalkan rumah mereka. Kondisi kemanusiaan dan kerawanan pangan semakin memburuk, demikian halnya dengan perekonomian dan akses internet hampir tidak ada. PBB telah memperingatkan bahwa setengah dari populasi Myanmar, atau sekitar 25 juta orang, dapat berada di bawah garis kemiskinan nasional pada tahun 2022. Kondisi yang kian memburuk mendorong kelompok-kelompok pro-demokrasi dan anti-militer untuk bersatu dan melakukan konsolidasi. Para politisi NLD dalam pengasingan dan persembunyian yang pada pemilihan umum November 2020 terpilih menjadi anggota parlemen, membentuk Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), atau parlemen bayangan. CRPH mengklaim bahwa merekalah yang secara sah memegang mandat rakyat sebagai parlemen, dan karenanya bertindak sebagai otoritas legislatif Myanmar yang mewakili semua.

CRPH kemudian membentuk sebuah pemerintahan bayangan yang dinamakan National Unity Government (NUG), yang anggotanya terdiri dari sisa-sisa anggota NLD, perwakilan kelompok etnis dan juga partai politik lainnya. Setelah dibentuk, NUG segera bekerja untuk menggalang pengakuan dan dukungan baik dari dalam maupun luar negeri, terutama untuk mendapatkan pengakuan internasional sebagai pemerintahan Myanmar yang sah.



Sepak terjang CRPH dan NUG tidak hanya pada domain politik dan diplomasi saja. Pada tanggal 5 Mei 2021, NUG mengumumkan pembentukan sayap militer yang dinamakan People's Defence Force (PDF), dengan tujuan utama untuk melindungi para pendukung dan simpatisan mereka dari serangan pasukan junta militer, sekaligus sebagai sebuah langkah awal pembentukan tentara nasional Myanmar yang baru, Federal Union Army. Tidak lama setelah secara resmi dibentuk, PDF berhadapan dengan Tatmadaw dalam sebuah pertempuran di Kota Muse, pada 23 Mei 2021. Sebanyak 13 prajurit junta militer dilaporkan tewas dalam pertempuran tersebut.¹⁰

Seiring berjalannya waktu, perlawanan dari CRPH, NUG, dan PDF terhadap junta militer semakin meluas. Intensitas perlawanan makin kuat setelah bergabungnya Kelompok Etnis Bersenjata (*Ethnic Armed Organization/EAO*). Gerakan masyarakat sipil pro-demokrasi yang semula mengedepankan metode damai ini, telah berkembang menjadi revolusi bersenjata melawan junta militer Myanmar. Untuk selanjutnya, hal ini memicu lahirnya perang saudara di Myanmar.

Tiga tahun sejak 1 Februari 2021, junta militer dan kelompok perlawanan yang terdiri dari PDF dan EAO masih saling serang. Akibatnya, puluhan ribu orang tewas, termasuk masyarakat sipil. Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) menyebut, setidaknya 50 ribu orang tewas sejak

¹⁰ Myanmar: 13 security forces members killed in clash with anti-coup bloc's defense force. (2021, 24 Mei). ANI. <https://www.aninews.in/news/world/asia/myanmar-13-security-forces-members-killed-in-clash-with-anti-coup-blocs-defence-force20210524083029/>.

junta militer melancarkan kudeta. Sebanyak 8 ribu di antaranya merupakan warga sipil.¹¹ Selain itu, sekitar 18,6 juta warga sipil harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar mereka yang makin sulit didapat. Sedangkan ribuan masyarakat kelas menengah melarikan diri ke hutan-hutan untuk berperang bersama kelompok etnis melawan junta militer. Para pemuda lebih memilih bergabung dengan PDF atau EAO ketimbang harus menjalani wajib militer atas perintah junta.¹²

Kondisi kesehatan masyarakat di Myanmar juga di ambang bencana karena banyak yang harus hidup di pengungsian.



Jutaan orang mengungsi sejak kudeta dengan kondisi kesehatan memburuk di pengungsian. Foto: <https://www.hrw.org/content/382193>

11 Fakta-fakta Terbaru 3 Tahun Perang Saudara di Myanmar. (2024, 6 April). *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240406091303-106-1083694/fakta-fakta-terbaru-3-tahun-perang-saudara-di-myanmar>.

12 Junta Militer Myanmar memberlakukan Wajib Militer Darurat sebagai cara untuk menambah sumber daya manusia militer dalam rangka berperang melawan PDF dan EAO.



Lebih dari 2,6 juta orang mengungsi di dalam negeri Myanmar, dengan lebih dari 2,3 juta di antaranya mengungsi sejak kudeta tahun 2021. Yang lebih mengesankan, dokter yang menjadi andalan merawat kesehatan justru menjadi target serangan junta militer. Selain pengungsian, masyarakat Myanmar juga menghadapi kondisi kehidupan yang tidak memadai, hambatan dalam mengakses bantuan kemanusiaan, kerawanan pangan, dan masalah keselamatan.¹³ Sementara itu, ada sekitar 88.000 orang di sembilan kamp pengungsi di Thailand, lebih dari 20.000 orang yang sangat rentan tersebar di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar dan setidaknya 300.000 penduduk desa di tenggara Myanmar.¹⁴

Disisi lain, pergerakan kelompok-kelompok perlawanan mulai unggul terhadap lawan mereka, pasukan junta militer. Sejak Oktober 2023, PDF dan EAO telah berhasil merebut sebagian besar wilayah di Myanmar dari pasukan junta. Umumnya, wilayah-wilayah yang direbut itu berada di dekat perbatasan. Keberhasilan PDF dan EAO ini membuat pasukan junta militer terjepit di tengah. Beberapa kelompok juga telah menyerang ibu kota, Naypyidaw, dengan *drone* dan membuat kemajuan di beberapa daerah perbatasan. Kelompok etnis Karen pada awal tahun 2024 telah berhasil merebut kota perdagangan yang terletak di sebelah timur Yangon, di sepanjang perbatasan Thailand. Kemajuan juga tercatat di negara bagian Kachin serta di negara bagian

13 US Committee for Refugees and Immigrants. (2024, 29 Februari). *Myanmar's Human Rights Crisis: In Freefall with Insufficient International Attention*. <https://refugees.org/myanmars-human-rights-crisis-in-freefall-with-insufficient-international-attention>.

14 The Border Consortium. (2024). *Annual Report 2023*. https://www.theborderconsortium.org/wp-content/uploads/2024/05/3.-Book_Annual-report-2023_ENG-compressed.pdf.

Rakhine. Beberapa analis memprediksi Tentara Arakan, milisi etnis di Rakhine, bisa saja mengambil alih Sittwe, ibu kota negara yang dijaga ketat oleh junta militer.¹⁵

Kondisi tersebut memperburuk nasib etnis Rohingya di Rakhine. Repatriasi terhenti karena perang dan tidak ada pemerintah yang bisa diminta pertanggungjawaban secara akuntabel (mengingat pemerintahan sipil telah dikudeta). Menurut UNHCR, hingga pertengahan 2023, terdapat sekitar 1,29 juta jiwa pengungsi dari Myanmar yang tersebar di banyak negara. Dari jumlah itu, 84,4% atau sekitar 1,1 juta orang di antaranya merupakan etnis Rohingya. Mayoritas pengungsi Rohingya telah melarikan diri dan diberi status pengungsi di Bangladesh lebih dari 960.000 jiwa, di Malaysia lebih dari 107.000 jiwa, dan di India lebih dari 22.000 jiwa. Sampai 29 Desember 2023, UNHCR juga mencatat bahwa Aceh telah kedatangan sekitar 1.608 orang pengungsi Rohingya.¹⁶

Yang lebih parah, etnis Rohingya yang bertahan di Rakhine (tidak mengungsi) diburu oleh junta militer dan tidak jarang juga menjadi korban di tengah-tengah pertempuran antara pasukan EAO dengan junta. Ironisnya, tidak seperti wilayah di belahan dunia lain, konflik Myanmar, sekalipun cukup menyita perhatian internasional, tetapi belum ada tekanan politik yang cukup besar dan mampu didengar oleh

15 Fakta-fakta Baru Perang Saudara di Myanmar, Junta Semakin Kewalahan. (2024, 24 April). *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240423152222-106-1089512/fakta-fakta-baru-perang-saudara-di-myanmar-junta-semakin-kewalahan>.

16 UNHCR. (2024). *Myanmar situation*. <https://reporting.unhcr.org/operational/situations/myanmar-situation>.

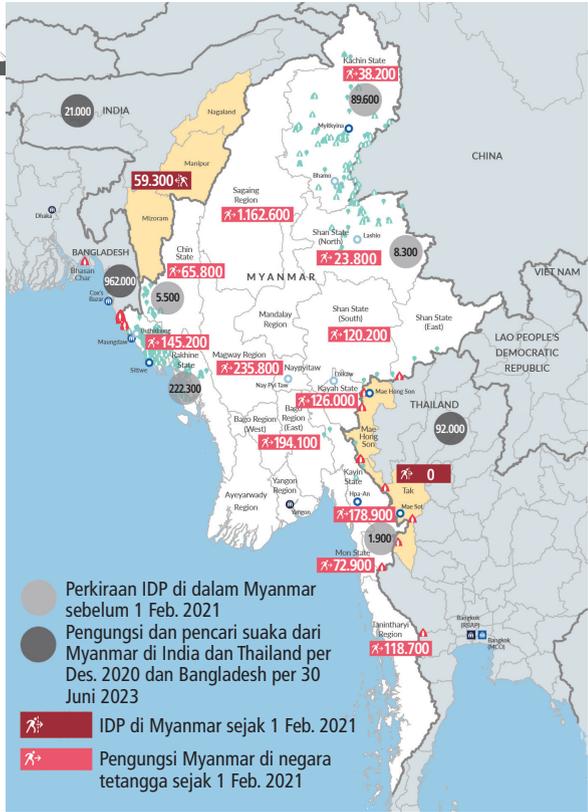


Jumlah Perkiraan Pengungsi, Pencari Suaka, dan Pengungsi Internal (UNHCR, 2024)



Pengungsi, Pencari Suaka, IDP (2024)

- ⇒ Pengungsi di luar Myanmar, orang-orang dalam situasi seperti pengungsi, dan pencari suaka: **1,35 juta**
- ⇒ IDP (*Internally Displaced People* Pengungsi Internal) di Myanmar: **2,3 juta**, 50% perempuan dan anak perempuan; 49% anak-anak.
- ⇒ Pengungsi dan IDP yang kembali: **771.400**.
- ⇒ Orang tanpa kewarganegaraan di Myanmar (Rohingya): **657.500**.



pihak-pihak yang bertikai agar tercipta gencatan senjata atau konflik berakhir. Namun yang jelas, Kudeta 1 Februari 2021 yang hari ini melahirkan perang saudara di Myanmar, telah memperburuk nasib etnis Rohingya.





PHOTO: [HTTPS://WWW.USIP.ORG/PUBLICATIONS/2021/04/14/MYANMAR-COUP-WEAKENS-SOUTHEN-SYRIA-SECURITY-AND-COOPERATION](https://www.usip.org/publications/2021/04/14/myanmar-coup-weakens-southern-syria-security-and-cooperation)

04 Krisis Myanmar Tantangan Besar ASEAN

Myanmar menempati posisi strategis secara geografis dan politik di Asia Tenggara, sebuah kawasan yang stabilitasnya menjadi perhatian internasional karena terletak di tengah-tengah Asia Pasifik. Oleh sebab itu, semua memiliki kepentingan (terutama ASEAN) terhadap stabilitas Asia Tenggara. Terlebih apabila sebuah konflik seperti yang terjadi di Myanmar telah mengakibatkan “*spillover effect*” yang meluas ke negara-negara tetangganya. Sejak terjadinya kekerasan terstruktur oleh junta militer terhadap etnis Rohingya, dunia internasional telah bereaksi cukup keras. Sementara sejak terjadinya kudeta 1 Februari 2021, permasalahan yang terjadi di Myanmar menjadi semakin kompleks. Terhadap kedua hal ini, sebagian besar negara Barat mengutuk. Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi kepada para pejabat junta militer sementara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres mengatakan kudeta tersebut merupakan ‘pukulan serius bagi reformasi demokrasi’.¹

¹ Angela Clare. (2021, 2 Juli). The Myanmar coup: a quick guide. *Parliament of Australia*. https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp2122/Quick_Guides/MyanmarCoup.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang beranggotakan 15 negara, telah mengadopsi beberapa pernyataan terkait Myanmar. Yakni, mengutuk penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan menyerukan militer untuk memulihkan transisi demokrasi. Akan tetapi, belum secara eksplisit mengutuk kudeta tersebut atau mengesahkan embargo senjata. Hal ini hampir pasti disebabkan oleh veto oleh Tiongkok, salah satu anggota DK PBB, dan sejumlah negara lainnya.

Pada tanggal 18 Juni 2021, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi yang tidak mengikat (tidak seperti resolusi DK PBB). Resolusi itu mengutuk pengambilalihan kekuasaan oleh militer, kekerasan berlebihan yang mematikan terhadap pengunjuk rasa, dan menyerukan embargo senjata serta pembebasan pejabat dan politisi yang ditahan secara sewenang-wenang. Sebanyak 119 negara memberikan suara mendukung resolusi tersebut dan 36 abstain, yang mencerminkan konsensus internasional yang luas terhadap kudeta 1 Februari 2021.²

Namun, secara objektif perlu diakui bahwa PBB secara luas dipandang memiliki catatan buruk dalam keterlibatannya di Myanmar. Sejumlah misi PBB gagal dalam beberapa dekade setelah pemberontakan tahun 1988, pelopor hak asasi manusia yang 'tidak membuahkan hasil', dan sikap diam atas 'penindasan terhadap warga Rohingya yang mengarah ke konflik di Myanmar serta kekejaman dan eksodus massal tahun 2017'.

² Ibid.



Meskipun Tiongkok telah mengambil sikap tradisionalnya yang tidak ikut campur dalam kudeta tersebut, Tiongkok mendukung seruan pembebasan Aung San Suu Kyi dan menyerukan kembalinya norma-norma demokrasi. Tiongkok juga menyatakan tidak senang dengan kudeta tersebut.³ Myanmar berbagi perbatasan terpanjangnya dengan Tiongkok, yang mempunyai pengaruh besar terhadap Myanmar. Tiongkok adalah mitra dagang dan investor terbesar Myanmar dan secara tradisional sering membela Myanmar dalam menghadapi tekanan internasional, khususnya dari Amerika Serikat. Tarik-menarik pengaruh antara Tiongkok dan Barat ini berpengaruh



Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mengutuk pengambilalihan kekuasaan oleh militer. Foto: <https://swarajyamag.com/insta/india-abstains-from-voting-on-unga-resolution-against-myanmar-military-junta>.

³ Zeyar Oo. (2020, 17 Februari). Myanmar's five Ms: misunderstanding, mistrust, misinterpretation, misconception and mistreatment. *The Strategist*. <https://www.aspistrategist.org.au/myanmars-five-ms-misunderstanding-mistrust-misinterpretation-misconception-and-mistreatment/>.

terhadap persoalan Myanmar. Walaupun hingga hari ini, Barat belum melakukan langkah-langkah yang cukup (selain melalui mekanisme sanksi), untuk memaksa pihak-pihak di Myanmar agar segera mengakhiri konflik.

Negara-negara ASEAN di sisi lain, sangat prihatin dengan dampak keamanan, politik, dan ekonomi dari kudeta Myanmar, yang telah meningkatkan risiko krisis kemanusiaan, kejahatan transnasional dan korupsi, kerugian ekonomi, dan hubungan internasional yang tidak stabil di kawasan. Australia di lain pihak, telah ikut serta dalam seruan internasional kepada ASEAN untuk memimpin upaya menekan Tatmadaw agar mengakhiri kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan mengembalikan Myanmar ke jalur demokrasi. Sebagai forum utama kerja sama di Asia Tenggara, tindakan ASEAN terhadap Myanmar dipandang sebagai ujian utama bagi kepemimpinan ASEAN di kawasan tersebut.

Indonesia dan Malaysia merupakan kekuatan terdepan di belakang KTT ASEAN mengenai situasi Myanmar pada 24 April di Jakarta. Pertemuan tersebut dapat dikatakan sebagai pertemuan internasional terkoordinasi pertama yang bertujuan untuk meredakan ketegangan di Myanmar. KTT tersebut mencapai kesepakatan dengan Min Aung Hlaing (yang hadir), mengenai Lima Poin Konsensus ASEAN, yaitu menyangkut:

1. Mengakhiri kekerasan;
2. Membina dialog konstruktif di antara semua pihak;



3. Menunjuk utusan khusus ASEAN;
4. Memberikan bantuan kemanusiaan;
5. Memfasilitasi kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar.

Pendekatan berbasis konsensus yang digunakan ASEAN, membuat tindakan apa pun terhadap Myanmar menjadi sulit. Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia dan Malaysia, adalah negara-negara yang paling bersedia bersuara menentang kudeta di Myanmar, sedangkan Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam sebagian besar mengikuti jejak Tiongkok dalam memperlakukan masalah ini sebagai masalah internal Myanmar. Tantangan terbesar bagi ASEAN dalam menyikapi dan memilih langkah yang tepat untuk kasus Myanmar adalah, aturannya sendiri (Statuta ASEAN mengenai konsensus). Aturan inilah yang di kemudian hari akan menjadi “penghalang” bagi diplomasi parlemen DPR RI untuk dapat merumuskan dokumen politik mengenai Rohingya, maupun Myanmar.





FOTO: VECTEEZY



BAGIAN

**Kiprah DPR
di Isu Myanmar**



FOTO - [HTTPS://WWW.USIP.ORG/PUBLICATIONS/2023/07/FOUR-TAKEAWAYS-ASEAN-SUMMIT](https://www.usip.org/publications/2023/07/four-takeaways-asean-summit)

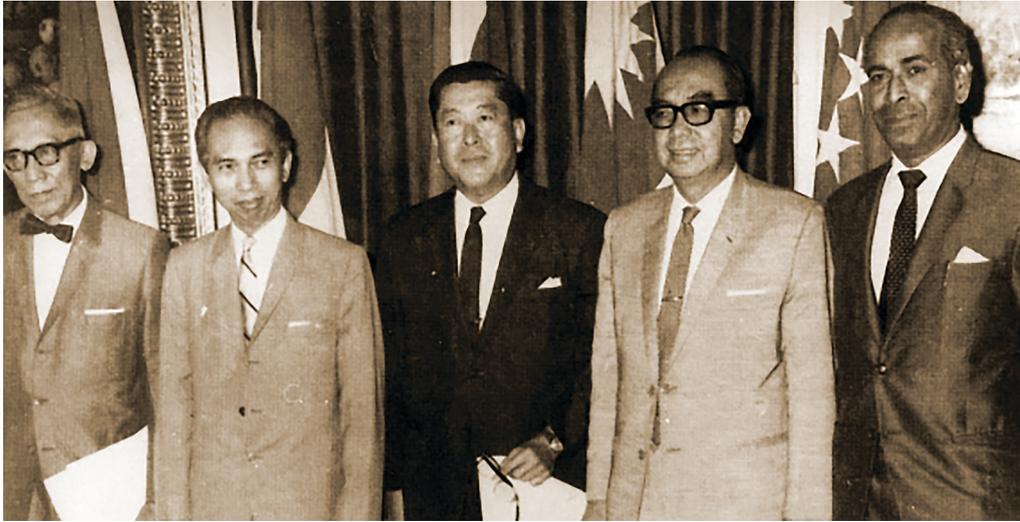
05 Menggugat Sentralitas ASEAN

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pendirian itu dilakukan dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok) oleh lima menteri luar negeri, yakni Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand. Mereka kini dikenal sebagai *Founding Fathers* ASEAN.¹

Sentralitas ASEAN

Sejak didirikan, ASEAN sudah berkembang sedemikian rupa. Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini selalu membenahi diri dan melakukan perubahan-perubahan guna penguatan di masa depan. Empat puluh tahun setelah pendiriannya, lahir *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN) yang disepakati dengan tujuan untuk mentransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki dasar hukum yang kuat (*legal personality*), dengan aturan yang jelas, serta memiliki struktur organisasi yang

¹ The Association of Southeast Asian Nations. (n.d.). *The Founding of ASEAN*. <https://asean.org/the-founding-of-asean/>.



Founding Fathers ASEAN, Narciso R. Ramos (Filipina), Adam Malik (Indonesia), Thanat Khoman (Thailand), Tun Abdul Razak (Malaysia), dan S. Rajaratnam (Singapura). Foto: *The Founding of ASEAN/Asean.org*.

efektif dan efisien.²—Piagam ASEAN ditandatangani oleh 10 kepala negara/pemerintahan negara anggota ASEAN pada KTT ke-13 ASEAN yang diselenggarakan di Singapura pada 20 November 2007. Setelah diratifikasi oleh seluruh anggota, piagam tersebut mulai berlaku efektif sejak 15 Desember 2008. Piagam ASEAN menyoroti prinsip, norma, nilai serta target-target dan komitmen yang jelas untuk ASEAN.

Salah satu komitmennya adalah tentang sentralitas ASEAN yang terdapat pada Pasal 1 poin 15 Piagam ASEAN. Poin tersebut menyebutkan bahwa salah satu tujuan ASEAN adalah untuk menjaga sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan pendorong utama dalam hubungan dan kerja

² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2009, 5 September). *Piagam ASEAN*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/117/halaman_list_lainnya/piagam-asean.



sama dengan mitra eksternalnya dalam arsitektur regional yang terbuka, transparan, dan inklusif. Sentralitas ASEAN dianggap menjadi elemen penting untuk menjaga perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan kawasan, dan untuk meningkatkan kredibilitas dan reputasi ASEAN di mata dunia.

Sentralitas ASEAN menjadi populer setelah pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF - Forum Regional ASEAN) pada tahun 1994 dan East Asian Summit (EAS - KTT Asia Timur) pada tahun 2005. Kendatipun demikian, ada yang melihat istilah sentralitas ASEAN itu sebagai sesuatu yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini mungkin karena definisi sentralitas ASEAN tidak dijelaskan secara gamblang dalam Piagam ASEAN atau dokumen lainnya, walaupun pembahasan terus diulang dan dicantumkan sebagai sesuatu yang penting. Amitav Acharya (2017) - ahli kajian tentang ASEAN dari American University, Washington DC, Amerika Serikat, menyebutkan salah satu tafsir yang mungkin disalahpahami adalah bahwa sentralitas ASEAN itu terkait dengan sejumlah konsep yang mirip satu sama lain, yakni ASEAN sebagai “pemimpin”, “penggerak”, “arsitek”, “pusat kelembagaan”, “pelopor”, “inti”, dan “titik tumpu” proses regional dan desain kelembagaan di kawasan Asia-Pasifik.³

Ia sendiri menganggap, gagasan sentralitas ASEAN memiliki sejumlah dimensi yang saling terkait. Namun, pengertian yang

3 Amitav Acharya.(2017,Agustus). The Myth of ASEAN Centrality? *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 39, No. 2 (August 2017), hal. 273-279.

paling jelas tetapi terbatas adalah bahwa sentralitas ASEAN itu berarti ASEAN terletak, dan harus tetap berada, di inti lembaga-lembaga regional Asia (atau Asia-Pasifik), khususnya ASEAN Plus Three (APT), Forum Regional ASEAN, dan KTT Asia Timur. ASEAN menyediakan “platform” kelembagaan yang menjadi landasan bagi lembaga-lembaga regional Asia Pasifik dan Asia Timur yang lebih luas. Dengan kata lain, tanpa ASEAN, tidak mungkin untuk membangun badan-badan regional yang lebih luas.⁴

Dalam satu kesempatan, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan bahwa konsep sentralitas ASEAN menekankan ASEAN harus menjadi platform regional yang dominan untuk mengatasi tantangan bersama, dan terlibat dengan kekuatan eksternal. ASEAN harus tetap berada di kursi kemudi dalam menavigasi tantangan geopolitik saat ini dan masa depan, termasuk melalui KTT Asia Timur dan ARF. Oleh karena itu, penguatan sentralitas ASEAN merupakan kondisi yang tidak dapat ditawar lagi agar ASEAN tetap mempertahankan identitasnya sebagai penjaga stabilitas dan perdamaian bagi negara-negara anggotanya dan kawasan Indo-Pasifik.⁵

Dinamika Indo-Pasifik

Gagasan untuk memperkuat platform sentralitas ASEAN terus digulirkan sejak disepakatinya Piagam ASEAN seiring meradangnya perkembangan geopolitik kawasan Indo-Pasifik

4 Ibid.

5 Kementerian PANRB. (2023, 13 Juli). *Menlu RI Ingatkan Peran ASEAN dalam Tantangan Geopolitik*. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menlu-ri-ingatkan-peran-asean-dalam-tantangan-geopolitik>.



yang, antara lain, dipicu oleh persaingan AS dan Tiongkok. Pada tahun 2010, saat keketuaan ASEAN dipegang oleh Thailand, diselenggarakan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-43. Dari pertemuan tersebut disepakati suatu komunikasi bersama yang menekankan pentingnya mempertahankan sentralitas ASEAN dalam arsitektur regional yang terus berkembang. Pertemuan para menlu ASEAN itu juga menyepakati percepatan integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN sambil secara proaktif memperluas dan memperdalam hubungan eksternal ASEAN dan memperkuat peran ASEAN sebagai kekuatan pendorong utama dalam mekanisme regional yang ada.

Perkembangan geopolitik regional Indo-Pasifik sendiri sangat cepat berubah dengan konstelasi yang menarik banyak kekuatan besar. Pada tahun 2007 Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memprakarsai *Quadrilateral Security Dialogue* (QSD) atau Dialog Keamanan Empat Pihak. Dialog yang kemudian menjadi suatu aliansi yang lebih dikenal sebagai “Quad” itu memiliki tujuan utama untuk mengintensifkan kerja sama antara empat negara mitra – Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat – dalam mengatasi tantangan mendesak di kawasan Indo-Pasifik. Dialog tersebut diselingi dengan latihan militer gabungan berskala besar yang diberi nama *Exercise Malabar*. Aliansi diplomatik dan militer tersebut secara luas dipandang sebagai respons terhadap peningkatan kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok.⁶

⁶ Tommy Patrio Sorongan. (2022, 20 Mei). Mengenal Quad, “NATO di Asia” Buat Seruduk China? *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220520180946-4-340589/mengenal-quad-nato-di-asia-buat-seruduk-china>.

Namun, Quad tak bertahan lama. Aliansi itu berhenti sejak 2008 yang, antara lain, karena ketegangan AS dan Australia. Negeri Kanguru yang saat itu dipimpin Perdana Menteri Kevin Rudd cenderung dekat dengan Tiongkok yang tidak bisa tidak membuat hubungan negeri itu dengan AS meradang. Akhirnya, Quad mati suri sekitar satu dekade.⁷ Saat diselenggarakan KTT ASEAN ke-31 di Manila pada November 2017, delegasi dari keempat mantan anggota Quad yang menghadiri KTT tersebut bertemu dan sepakat untuk menghidupkan kembali Quad untuk melawan Tiongkok secara militer dan diplomatis di kawasan Indo-Pasifik.⁸

Mengingat ketegangan di kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS) sedang memanas, gagasan menghidupkan Quad mendapat sambutan dari mantan anggotanya sehingga tinggal menunggu waktu bagi aliansi itu untuk hidup kembali. Gagasan menghidupkan Quad itu sempat menimbulkan dugaan bahwa kelak aliansi tersebut akan menjadi pesaing ASEAN yang signifikan. Namun, banyak juga yang melihat posisi Quad akan dilematis. Menurut Fukushima (2018), jika ingin berkelanjutan, Quad harus menjadi mekanisme yang inklusif dan mampu menyesuaikan diri dengan kebijaksanaan regionalisme yang berpusat pada ASEAN (sentralitas ASEAN).⁹ Namun, jika hal ini dilakukan, posisi Quad akan dilematis. ASEAN tidak mungkin menyerap sentimen anti-Tiongkok dalam ruang lingkup dan intensitas yang

⁷ Ibid.

⁸ Zongyou Wei. (2022). The evolution of the 'QUAD': driving forces, impacts, and prospects. *China Int Strategy Rev.* 2022; 4(2): 288–304. DOI: 10.1007/s42533-022-00119-w.

⁹ Akiko Fukushima. (2018, 30 November). The Quad As a Caucus for Cooperation. *Real Clear Defense*. https://www.realcleardefense.com/articles/2018/11/30/the_quad_as_a_caucus_for_cooperation_113992.html.



diperlukan untuk keterlibatan praktis dengan Quad, ketika anti-Tiongkok sangat penting bagi Quad. Selain itu, Quad akan kehilangan penentuan nasib sendiri dan prestisenya jika terlalu dekat dengan ASEAN yang jauh lebih matang secara kelembagaan.¹⁰ Bagaimana sikap ASEAN sendiri terhadap Quad?

Menanggapi perkembangan tersebut, para pemimpin ASEAN kembali menegaskan pentingnya sentralitas ASEAN sebagai prinsip dasar untuk mempromosikan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, dengan mekanisme yang dipimpin ASEAN (*ASEAN-led mechanism*). Penegasan itu tertuang dalam dokumen *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP) yang



Sentralitas ASEAN sebagai prinsip dasar untuk mempromosikan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik. Foto: <https://www.straitstimes.com/opinion/the-future-of-singapore-in-asean-30>

¹⁰ Igor Denisov, Oleg Paramonov, & Ivan Safranchuk. (2021, 15 Maret). Russia, China, and the concept of Indo-Pacific. *Journal of Eurasian Studies*, 12(1), 72-85. <https://doi.org/10.1177/1879366521999899>.

diadopsi pada KTT ASEAN ke-34 di Thailand pada Juni 2019.

Namun, relevansi dan efektivitas dari sentralitas ASEAN masih perlu diperkuat dan diperjuangkan sehingga tidak hanya menjadi sebuah jargon belaka atau hanya digunakan untuk memperindah sebuah dokumen. Terlebih-lebih masing-masing negara ASEAN memiliki tafsir prinsip yang berbeda-beda tentang sentralitas ASEAN.¹¹

Hingga saat ini, berbagai tantangan yang berada di depan mata dan belum menemukan titik terang masih menjadi ujian bagi sentralitas ASEAN untuk berperan lebih nyata. Tantangan tersebut termasuk ketegangan di Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan munculnya kerja sama baru dari kekuatan dunia, selain menghidupkan kembali Quad. Pada 2021, Australia, Inggris, dan AS menggagas kerja sama trilateral yang disebut AUKUS (Australia, United Kingdom, United States). Keberadaan AUKUS ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, tetapi hal ini justru dapat memicu ketegangan dan rivalitas di kawasan, apalagi di tengah rivalitas AS dan Tiongkok yang memanas.

Meskipun di satu sisi pemerintah Australia dan AS menyatakan bahwa kerja sama AUKUS tidak memperlemah atau menggantikan sentralitas ASEAN dalam upaya membangun keamanan dan stabilitas kawasan, terutama di wilayah Indo-

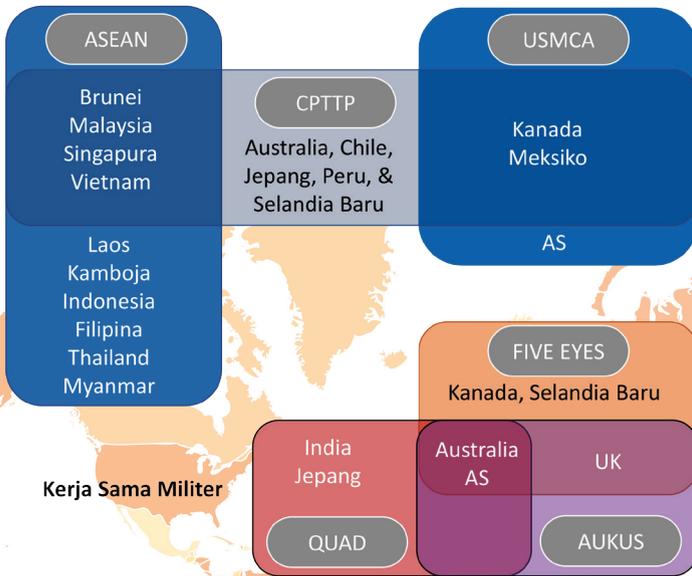
¹¹ Manjari Chatterjee Miller. (2023, 22 Agustus). Cooperation Between ASEAN and the Quad is Critical for Indo-Pacific Stability. *Council on Foreign Relations*. <https://www.cfr.org/blog/cooperation-between-asean-and-quad-critical-indo-pacific-stability>.



Pasifik, di sisi lain kehadiran kerja sama itu menimbulkan pertanyaan akan ketegasan ASEAN yang seharusnya menjadi “pemain utama” dalam membantu memecahkan masalah. Sayangnya, respons yang berbeda justru muncul dari negara-negara anggota ASEAN yang mengakibatkan ASEAN tidak mempunyai satu suara yang jelas karena pandangan yang berbeda.

Beragam Kerja Sama Antarnegara di Bidang Militer, Ekonomi, dan Perdagangan di Kawasan Indo-Pasifik

Kerja Sama Perdagangan dan Ekonomi



ASEAN: Association of Southeast Asian Nations.
CPPTP: Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership.
USMCA: United States-Mexico-Canada Agreement.
FIVE EYES: Aliansi intelijen Anglosfer yang terdiri dari Australia, Kanada, Selandia Baru, Britania Raya, dan Amerika Serikat.
QUAD: Quadrilateral Security Dialogue.
AUKUS: Australia, United Kingdom, United States.

Kerja Sama Militer

Sumber: Diolah dari *The Economist* dan sumber lain.

Rohingya dan Myanmar

Tantangan lain yang tidak kalah penting dan harus menjadi prioritas ASEAN di level pemerintah dan parlemen adalah krisis kemanusiaan yang kian merebak serta pemulihan demokrasi dan perdamaian di Myanmar yang belum terwujud. Konsensus Lima Poin (*Five-Point Consensus/5PC*) ASEAN yang disepakati pada *ASEAN Leaders' Meeting* tanggal 24 April 2021, belum terlaksana secara efektif dan sepenuhnya.

Adapun isi dari *5-Point Consensus* itu adalah:

1. Kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya;
2. Dialog konstruktif antara semua pihak terkait harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat;
3. Utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN;
4. ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre (*The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management*);
5. Utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

DPR RI, yang mempunyai mandat dan fungsi diplomasi parlemen, secara konsisten terus mengangkat isu krisis di Myanmar di forum parlemen dunia. Mandat diplomasi parlemen yang dimiliki DPD RI itu tertuang dalam Pasal



68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Pasal 68 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Pasal 69 menyebutkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, DPR RI, termasuk melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), berpartisipasi secara aktif dengan mengusulkan berbagai resolusi di forum-forum parlemen seperti ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA),¹² Asian Parliamentary Assembly (APA), dan Inter-Parliamentary Union (IPU). Kesepakatan untuk mengadopsi suatu resolusi yang diusulkan anggota yang diambil di AIPA berbeda dengan di APA dan IPU karena resolusi di AIPA harus disepakati melalui konsensus bukan *voting*. Pengambilan keputusan dengan konsensus berarti persetujuan harus diberikan oleh seluruh anggota, sedangkan jika melalui *voting* berdasarkan suara terbanyak. Menurut Statuta AIPA, keputusan-keputusan Sidang Umum AIPA maupun Komite Eksekutif mengenai pokok bahasan apa pun harus dibuat secara konsensus. Keputusan yang berdasarkan konsensus ini

12 AIPA merupakan organisasi parlemen regional yang dibentuk pada 2 September 1977 yang pada awalnya bernama Organisasi Antar-Parlemen ASEAN (AIPO).

pun juga dianut di level pemerintah di ASEAN. Pasal 20 poin 1 Piagam ASEAN menegaskan bahwa sebagai prinsip dasar, pengambilan keputusan di ASEAN harus berdasarkan pada konsultasi dan konsensus.

Selain itu, setiap resolusi yang diusulkan oleh parlemen negara anggota ASEAN juga harus melewati tahap dan mekanisme yang ada. Dalam hal ini, harus mengajukan dan membahas resolusi-resolusi tersebut di Komite Eksekutif Sidang Umum AIPA sebelum dibahas pada komite-komite yang ada di AIPA, seperti Komite Politik dan Keamanan, Komite Ekonomi, Komite Sosial, dan Komite Organisasi.

Karena harus adanya konsensus atau kesepakatan atau permufakatan bersama untuk keputusan dan/atau resolusi yang akan diadopsi, situasi dapat semakin sulit. Apalagi jika dokumen atau resolusi itu mengangkat isu yang dianggap sensitif dan juga mengingat pandangan dan kepentingan masing-masing negara anggota ASEAN, termasuk parlemennya, yang berbeda.

Belum lagi jika dianggap melanggar prinsip *non-interference*. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*¹³ yang disahkan pada tahun 1976 menegaskan bahwa adalah hak setiap negara untuk menjalankan kehidupannya nasionalnya bebas dari campur tangan, subversi, atau paksaan dari pihak luar; dan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri

¹³ *The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)* ditetapkan pada tahun 1976 dan memuat prinsip-prinsip universal tentang hidup berdampingan secara damai dan kerja sama yang bersahabat di antara negara-negara di Asia Tenggara. Perjanjian ini merupakan kode yang mengikat secara hukum untuk hubungan antarnegara di kawasan tersebut dan sekitarnya.



satu sama lain. Prinsip *non-interference* ini juga tercantum dalam *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN) dan menjadi dasar hubungan regional di antara negara-negara anggota ASEAN.

Sejak Indonesia pertama kali mengajukan resolusi terkait etnis Rohingya pada Sidang Umum AIPA tahun 2017 di Filipina, AIPA tidak pernah meraih kesepakatan secara khusus terkait hal tersebut. Oleh karena masalah etnis Rohingya tidak mau dibahas di Komite Bidang Politik, padahal isu Rohingya merupakan masalah politik kawasan dengan isu kemanusiaan yang paling krusial, maka DPR RI menolak membahas masalah politik apa pun di komite tersebut. Akibatnya, Sidang Umum AIPA tahun 2017, 2018, dan 2019 tidak menghasilkan resolusi politik apa pun. Pada Sidang Umum AIPA ke-40



Isu Rohingya merupakan masalah politik kawasan dengan isu kemanusiaan yang paling krusial. Foto: <https://www.theguardian.com/world/2019/mar/01/rohingya-crisis-bangladesh-says-it-will-not-accept-any-more-myanmar-refugees>.

tahun 2019 di Bangkok, Thailand, Myanmar untuk kesekian kalinya menolak dengan tegas isu krisis Rohingya masuk ke dalam pembahasan Sidang Komisi Politik AIPA. Sayangnya, sejumlah parlemen lain, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Singapura, lebih bersikap diam dan menyerahkan kepada mekanisme konsensus. Alhasil, isu Rohingya tidak bisa diadopsi menjadi resolusi AIPA.

Pada di tingkat yang lebih tinggi resolusi tentang Rohingya yang diajukan Indonesia mendapat respons positif. Pada tahun 2017 dalam Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-137 yang diselenggarakan di Saint Petersburg, Rusia, Indonesia mengusulkan agenda darurat (*emergency item*) terkait krisis Rohingya. Draf resolusi usulan Indonesia tersebut diterima dan diadopsi menjadi resolusi sidang itu melalui *voting*.¹⁴ Ini merupakan gebrakan DPR RI untuk menunjukkan bahwa isu tersebut sudah seharusnya menjadi isu prioritas di level regional, apalagi isu tersebut terjadi di kawasan ASEAN. Meskipun disepakati melalui suara mayoritas, dalam *voting* tersebut, beberapa parlemen negara anggota ASEAN, yaitu Myanmar, Singapura, Laos, dan Kamboja, justru menolak krisis Rohingya dimasukkan ke dalam resolusi IPU.

Pada Sidang Umum AIPA ke-41 yang diselenggarakan secara virtual di Vietnam tahun 2020, DPR RI kembali mengajukan resolusi terkait krisis kemanusiaan atas etnis Rohingya dan mengangkat pentingnya pemberian bantuan kemanusiaan

¹⁴ Sabrina Asril Penulis. (2017, 16 Oktober). Kalahkan Isu Nuklir Korut, Indonesia "Golkan" Isu Rohingya Jadi Resolusi IPU". *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/16/11024631/kalahkan-isu-nuklir-korut-indonesia-golkan-isu-rohingya-jadi-resolusi-ipu?page=all>.



serta proses repatriasi yang aman dan bermartabat bagi para pengungsi Rohingya di Rakhine. Meskipun usulan resolusi tersebut mendapatkan dukungan, termasuk masukan dari Thailand dan Malaysia, akan tetapi, Myanmar menolak tegas pembahasan Rohingya di Sidang Umum AIPA tersebut. Oleh karena itu, resolusi tentang Rohingya kembali tidak disepakati. Meskipun demikian, untuk pertama kalinya sejak 2017, Indonesia tidak lagi menolak pembahasan draf resolusi politik lainnya. Selain isu Rohingya, draf resolusi politik lain yang diajukan Indonesia adalah tentang pentingnya stabilitas kawasan di masa pandemi khususnya dalam konteks isu Laut Tiongkok Selatan (LTS). Pada kesempatan tersebut delegasi dari negara-negara ASEAN sepakat menciptakan perdamaian, meredakan ketegangan, melakukan langkah-langkah kerja sama multilateral dalam menjunjung penerapan hukum internasional, termasuk United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).¹⁵

Pada tahun 2021, keadaan di Myanmar menjadi sangat memprihatinkan dengan meningkatnya kekerasan, penggunaan kekuatan berlebihan, dan pelanggaran hak asasi manusia, jatuhnya korban jiwa dan kematian warga sipil, pengungsian dan situasi pengungsian yang semakin parah, terutama setelah adanya kudeta militer terhadap pemerintah sipil. Oleh karena itu, DPR RI kembali mengusulkan agenda darurat (*emergency item*) yang berbentuk resolusi dengan judul “*Parliamentary Support on the Situation in Myanmar*”.

¹⁵ Imam Budilaksono. (2020, 10 September). DPR: AIPA sepakat selesaikan COVID-19 dan konflik LCS secara bersama. *Antaraneews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/1719194/dpr-aipa-sepakat-selesaikan-covid-19-dan-konflik-lcs-secara-bersama>.

Draf resolusi itu mendesak agar militer Myanmar menahan diri sepenuhnya dan segera menghentikan semua kekerasan terhadap demonstran damai, anggota masyarakat sipil, perempuan, pemuda dan anak-anak. Selain itu, juga menyuarakan perlunya menjaga persatuan, sentralitas, dan relevansi ASEAN di kawasan dan secara kolektif mengatasi tantangan bersama berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam ASEAN. Namun, agenda darurat atau resolusi tersebut kembali gagal untuk diadopsi pada sidang umum.

Usulan Perubahan Mekanisme Konsensus AIPA

Karena isu Rohingya selalu digagalkan melalui konsensus, dalam hal ini, DPR RI berpandangan bahwa Statuta AIPA terkait mekanisme konsensus untuk pengambilan keputusan penting agar diubah atau diamandemen menjadi pengambilan keputusan berdasarkan *voting* dengan mengambil suara terbanyak dari jumlah anggota AIPA, dan/atau melewati mekanisme pengambilan keputusan lainnya yang efektif dan bermakna ketika tidak tercapai konsensus. Hal tersebut mempunyai tujuan untuk tidak mengganggu lahirnya resolusi atau dokumen lainnya yang diusulkan oleh parlemen anggota AIPA, dan tidak mengakibatkan isu penting dan genting untuk diabaikan, hanya karena salah satu parlemen anggota AIPA keberatan terhadap isu yang diangkat. Jika mekanisme terus berjalan seperti ini, tentunya dapat memengaruhi stabilitas di kawasan, dan dapat mengesampingkan peran ASEAN dan prinsip sentralitasnya.



Pada Sidang Umum AIPA ke-42 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, DPR RI mengajukan usulan terhadap amandemen Statuta AIPA pada Sidang Komisi Organisasi, yaitu terkait mekanisme pengambilan–keputusan dalam Sidang Umum. Indonesia mengajukan usulan terhadap Article 9 (7.a) Statuta AIPA, yaitu dihapusnya–kalimat “*only matters on which consensus cannot be attained shall be dropped*”. Selain itu, Indonesia juga mengusulkan digabungnya kalimat dalam Article 9 (7.a) dengan Article 9 (7.b) menjadi 1 paragraf yang berbunyi “*Decisions by the General Assembly on any subject shall be made by consensus. When consensus cannot be achieved, the General Assembly may decide on how a specific decision can be made*”.

Selama perjuangan yang panjang dan dihambat oleh sistem berbasis konsensus, DPR RI, pada Sidang Umum AIPA ke-43 tahun 2022 di bawah keketuaan Kamboja yang juga tidak dihadiri oleh perwakilan atau parlemen Myanmar, mengajukan agenda darurat (*emergency item*) yang berbentuk resolusi yang berjudul “*Resolution On Parliamentary Diplomacy for The Implementation of ASEAN Five-Point Consensus*”. Agenda darurat ini dibahas pada Komite Politik Sidang Umum AIPA dan akhirnya berhasil diadopsi pada Sidang Umum AIPA di Kamboja tersebut.

Resolusi ini secara garis besar mendesak aparat keamanan Myanmar dan semua pihak terkait untuk mematuhi dan memenuhi pelaksanaan *Five-Points Consensus*, yang dianggap DPR RI belum ada kemajuan dalam implementasinya. Selain



Sidang Umum AIPA ke-43 tahun 2022 di Kamboja. Foto: Dok. BKSAP.

itu, juga menegaskan perlunya komitmen untuk membantu rakyat Myanmar dalam menemukan solusi damai untuk situasi yang dihadapi.

Sidang Umum AIPA di Jakarta

Pada tahun 2023, Indonesia memegang tongkat estafet keketuaan ASEAN dan mengangkat tema “*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*”. Dalam hal ini, “*ASEAN Matters*” menggambarkan upaya Indonesia menjadikan ASEAN tetap relevan dengan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada, sekaligus menjadi motor stabilitas serta perdamaian kawasan. Sehubungan dengan ini, pilar tersebut memiliki beberapa elemen penting seperti penguatan terhadap kapasitas dan efektivitas ASEAN, persatuan ASEAN, dan sentralitas ASEAN. Sedangkan “*Epicentrum of Growth*” menandakan upaya memperkuat kerja sama dan untuk negara-negara di Asia Tenggara agar terus menjadi pusat pertumbuhan



ekonomi. Terkait dengan hal tersebut, pilar ini mempunyai beberapa elemen, seperti arsitektur kesehatan, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan stabilitas keuangan.

Bercermin pada tema keketuaan ASEAN, DPR RI, di bawah keketuaan Indonesia di ASEAN, juga menggelar pertemuan-pertemuan atau sidang-sidang AIPA, termasuk Sidang Umum AIPA ke-44 pada bulan Agustus 2023 di Jakarta. Sidang umum tersebut mengambil tema “*Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN*”. Melalui tema tersebut, DPR RI berharap parlemen negara-negara ASEAN juga dapat berkontribusi dalam mendorong penguatan sentralitas ASEAN, mewujudkan ASEAN yang lebih responsif terhadap tantangan dan dinamika kawasan, serta merealisasikan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Pada seluruh rangkaian acara AIPA di Jakarta selama presidensi DPR RI di AIPA, DPR RI, sebagai tuan rumah, tidak mengundang perwakilan parlemen Myanmar untuk hadir dan berpartisipasi. Sidang Umum AIPA ke-44 berhasil mengadopsi resolusi yang berjudul “*Resolution on Parliamentary Cooperation in Contributing to Long-Lasting Peace in Myanmar*” yang di antaranya membahas kemungkinan pembentukan mekanisme yang sesuai mengenai isu Myanmar, yang akan membantu memantau implementasi *Five-Point Consensus*.

Dorongan ini menjadi bagian dari salah satu langkah DPR RI untuk memperkuat dan meningkatkan sentralitas ASEAN, dan

menjadikan AIPA sebagai *problem solver* dan tidak melakukan *business-as-usual*. Apalagi jika dapat bekerja secara khusus dan fokus kepada satu isu, bahkan melihat secara langsung keadaan di Myanmar sebagai bagian dari pemantauan implementasi *Five-Point Consensus*, sesuai dengan resolusi tersebut.

Sidang Umum AIPA ke-45 yang akan dilaksanakan di Laos pada bulan Oktober 2024, diharapkan dapat menjadi saksi terbentuknya mekanisme tersebut, beserta tujuan dan aktivitas kerja yang dapat dilakukan oleh anggota AIPA, karena membutuhkan pembahasan dan pengadopsian resolusi untuk membentuk mekanisme tersebut. Forum-forum parlemen lainnya telah mempunyai mekanisme, seperti gugus tugas. Contohnya, Inter-Parliamentary Union (IPU) mempunyai gugus tugas (*task force*) terkait konflik Rusia-Ukraina yang dibentuk berdasarkan resolusi Sidang Umum IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali, dengan Ketua BKSAP DPR RI periode 2019-2024, Dr. Fadli Zon, menjadi salah satu anggota yang mewakili kawasan Asia Pasifik. Gugus tugas, yang masih berfungsi hingga saat ini, telah mengunjungi Kiev, Bucha, Irpin, dan Moskow pada tahun 2022 dan mempunyai misi untuk membuka kran dialog demi mengakhiri konflik, serta untuk menjadi jembatan dialog antara Rusia dan Ukraina dalam mencari solusi damai melalui diplomasi parlemen.

Secara keseluruhan, ke depannya DPR RI bisa mendorong ASEAN dan AIPA untuk terus menggaungkan dan menjadikan sentralitas ASEAN agar menjadi isu utama ASEAN dan AIPA,



Sidang Umum AIPA ke-44 di Jakarta: “Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN”. Foto: Buletin Parleментарia.

dengan pandangan untuk mengoptimalkan dan memperkuat sentralitas ASEAN. Hal ini perlu dilakukan demi memastikan tidak pudarnya prinsip sentralitas ASEAN, dan agar ASEAN tetap menjadi pemain utama dalam mewujudkan stabilitas dan perdamaian di kawasan.

DPR RI, melalui diplomasi parlemennya, bertekad untuk membantu mewujudkan visi ASEAN 2045 yang lebih adaptif, responsif, dan kompetitif, serta tidak dilemahkan atau dikesampingkan oleh rivalitas atau persaingan antarnegara. Termasuk juga untuk memastikan agenda-agenda seperti AOIP agar dapat diimplementasikan secara efektif, mengingat persaingan yang semakin ketat di kawasan Indo-Pasifik.





FOTO: [HTTPS://WWW.NYTIMES.COM/2021/02/02/](https://www.nytimes.com/2021/02/02/opinion/yanmar-coup-eye-witness.html)
OPINIONMYANMARCOUP-EYEWITNESS.HTML

06 Menjangkau Parlemen Myanmar yang Terasing

Kudeta militer pada 1 Februari 2021 tidak hanya menciptakan krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara. Di tengah kekacauan tersebut, Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) muncul sebagai simbol perlawanan rakyat Myanmar terhadap rezim militer. CRPH, yang dibentuk oleh para anggota parlemen yang terpilih dalam pemilu November 2020, berperan penting dalam menjaga kelangsungan pemerintahan sipil dan memperjuangkan hak-hak rakyat yang telah dirampas oleh junta. Dalam menjalankan fungsinya, CRPH tidak hanya menghadapi tantangan di dalam negeri, tetapi juga berupaya mendapatkan dukungan internasional untuk memperkuat posisinya sebagai representasi sah dari rakyat Myanmar.

Komunitas internasional, termasuk organisasi dan jaringan parlemen dunia seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), turut mendukung legitimasi CRPH. IPU telah mengakui

CRPH sebagai *interlocutor* atau mitra dialog yang sah, termasuk DPR RI yang telah secara aktif menjalin komunikasi dan dialog, menunjukkan solidaritas terhadap upaya rakyat Myanmar untuk memulihkan demokrasi. Melalui pengakuan ini, CRPH terus menjalankan fungsinya meskipun berada dalam pengasingan, sekaligus memperkuat diplomasi untuk mendesak penghentian kekuasaan militer di Myanmar.

Keterlibatan dan dialog aktif DPR RI dengan CRPH memiliki kepentingan strategis, baik dari segi diplomasi maupun politik luar negeri Indonesia. Peran DPR RI dalam menjalin dialog dan keterlibatan dengan CRPH tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas di kawasan ASEAN, tetapi juga untuk memperkuat sentralitas ASEAN dalam mencari solusi damai bagi krisis Myanmar. Keterlibatan ini diharapkan dapat mendorong dialog konstruktif, memperkuat solidaritas regional, dan berkontribusi nyata dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung.

Dukungan Internasional pada CRPH

Kudeta militer yang mengguncang Myanmar pada 1 Februari 2021 terjadi hanya beberapa jam sebelum Parlemen baru yang terpilih pada pemilu 2020 dijadwalkan untuk bersidang. Pergolakan besar ini memicu krisis politik dan kemanusiaan yang mendalam, mengakibatkan penangkapan sewenang-wenang terhadap para pemimpin sipil, termasuk Presiden U Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, serta



sejumlah besar anggota parlemen dan aktivis politik. Dalam situasi darurat ini, Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) dibentuk pada tanggal 5 Februari 2021 sebagai respons langsung terhadap kudeta tersebut.¹ CRPH muncul sebagai simbol perlawanan dan harapan rakyat Myanmar, berperan penting dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia yang terancam oleh junta militer.



Dukungan masyarakat Myanmar terhadap CRPH yang dibentuk pasca-kudeta. Sumber: Allegra Mendelson, (2021, 12 Maret), *Vying for legitimacy as Myanmar's recognised government, who are the CRPH?* Southeast Asia Globe, <https://southeastasiaglobe.com/crph-myanmar/>.

1 Library of Congress. (2021). *Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw*. <https://www.loc.gov/item/lcwaN0035764/>

CRPH didirikan oleh 298 anggota parlemen yang secara demokratis dipilih dalam pemilu multi-partai yang diadakan pada 8 November 2020. Pemilu ini dianggap bebas dan adil oleh para pengamat, baik domestik maupun internasional, dengan lebih dari 71% pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara mereka, meskipun diadakan di tengah ancaman pandemi Covid-19.² Hasil pemilu menunjukkan kemenangan telak bagi partai Liga Nasional untuk Demokrasi/*National League for Democracy* (NLD).

Namun, tanpa bukti yang jelas, partai proksi militer, Union Solidarity and Development Party (USDP), mengajukan klaim palsu tentang kecurangan pemilu yang meluas. Meskipun Jenderal Min Aung Hlaing sempat mengakui hasil pemilu, ia kemudian memerintahkan militer untuk mengambil alih kekuasaan secara paksa.

Dalam konteks inilah, CRPH lahir sebagai perwujudan dari kehendak rakyat Myanmar yang telah memberikan mandat kepada para anggota parlemen terpilih untuk menjalankan pemerintahan sipil yang sah. Pada sesi darurat parlemen yang pertama diadakan secara virtual, CRPH diberi mandat untuk melanjutkan tugas-tugas parlemen yang mencakup fungsi legislatif, pengawasan, dan representasi. Meskipun pertemuan ini dilakukan secara virtual, 63% anggota parlemen hadir, sehingga memenuhi kuorum yang sah. Beberapa anggota parlemen yang tidak dapat hadir memberikan dukungan

2 Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw. (2021). *History and Formation of CRPH*. <https://crphmyanmar.org/history-and-formation-of-crph/>



tertulis melalui surat yang ditandatangani, sehingga jumlah total anggota parlemen yang mendukung pembentukan CRPH mencapai 398 orang.³

Berdasarkan mandat pembentukannya, CRPH bertujuan untuk mempertahankan pemerintahan sipil yang sah di Myanmar di tengah ancaman militer, mengakhiri kediktatoran militer dan membebaskan tahanan politik, serta membangun negara demokrasi federal yang inklusif. Pada 7 Februari 2021, CRPH mengutuk kudeta militer sebagai tindakan kriminal dan secara resmi menolak Dewan Administrasi Negara/*State Administration Council* (SAC) yang dibentuk militer sebagai pemerintahan ilegal, sekaligus mencabut Konstitusi 2008 yang dibuat oleh militer dengan rencana menyusun konstitusi baru yang demokratis.⁴ Selain itu, CRPH aktif mendukung gerakan perlawanan sipil, termasuk *Civil Disobedience Movement* (CDM) dan protes damai rakyat Myanmar, meskipun dihadapkan pada tindakan brutal militer. Pada 1 Maret 2021, CRPH menyatakan SAC sebagai organisasi teroris,⁵ menandai langkah penting dalam upaya delegitimasi rezim militer di mata internasional.

Dalam beberapa bulan setelah pembentukannya, CRPH juga memperluas keanggotaannya dengan melibatkan anggota parlemen dari partai-partai etnis. Langkah ini tidak hanya memperkuat legitimasi CRPH, tetapi juga menegaskan bahwa mereka mewakili seluruh spektrum masyarakat Myanmar,

3 Ibid.

4 Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw. (2021). *Formation and Mandate*. <https://crphmyanmar.org/history-and-formation-of-crph/>

5 Ibid.

termasuk kelompok etnis yang selama ini terpinggirkan. Kemudian pada 16 April 2021, CRPH mengumumkan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional/*National Unity Government* (NUG), setelah disetujuinya Piagam Demokrasi Federal (*Federal Democracy Charter*) yang disusun oleh Dewan Konsultatif Persatuan Nasional/*National Unity Consultative Council* (NUCC).⁶

Selain fungsi domestiknya, CRPH juga secara aktif terlibat dalam diplomasi internasional untuk mendapatkan pengakuan dan menggalang dukungan dari komunitas global. Selain sebagai



Rakyat Myanmar berunjuk rasa di New York mendukung NUG dan duta besar Myanmar untuk PBB menjelang Majelis Umum. Foto: <https://www.irrawaddy.com/news/burma/intl-community-cant-be-relied-on-for-myanmar-democracy-movement-or-peoples-safety-nug.html>.

6 Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw. (2021). *Functions of CRPH*. <https://crphmyanmar.org/functions/>



pemerintahan bayangan untuk mengoordinasikan perlawanan terhadap junta militer dan mempersiapkan transisi menuju demokrasi federal, NUG yang telah dibentuk juga berfungsi sebagai entitas yang menggalang dukungan internasional melalui berbagai kementerian—termasuk Kementerian Luar Negeri—yang aktif menjalin hubungan diplomatik.

Dukungan dari komunitas internasional dan regional, termasuk ASEAN dan Indonesia sebagai salah satu pemimpin di kawasan, menjadi kunci dalam memberikan tekanan terhadap junta militer dan memperkuat aspirasi rakyat Myanmar untuk hidup dalam kebebasan dan demokrasi, serta menegaskan bahwa CRPH adalah representasi sah dari kehendak rakyat Myanmar. Dukungan juga datang dari IPU, organisasi global yang mewakili parlemen nasional di seluruh dunia. Sejak Sidang Umum IPU ke-142 pada Mei 2021, IPU telah menetapkan CRPH sebagai pengamat resmi.⁷ Posisi CRPH kemudian diperkuat sebagai *interlocutor* atau mitra dialog yang sah pada Sidang Umum IPU ke-143 di Madrid, Spanyol, pada November 2021. Sidang tersebut menegaskan pengakuan terhadap CRPH sebagai wakil sah dari parlemen Myanmar.⁸ Langkah ini memungkinkan CRPH untuk terus terlibat dalam diplomasi parlemen internasional, meskipun berada dalam pengasingan.

Pada saat DPR RI menjadi tuan rumah Sidang Umum IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali, pada Maret 2022, *Governing*

7 Inter-Parliamentary Union. (2021). *142nd IPU Assembly and Related Meetings, Results of the Proceedings, 24–27 May 2021, Virtual Session*. <https://www.ipu.org/file/11849/download>.

8 Inter-Parliamentary Union. (2021). *143rd IPU Assembly and Related Meetings, Results of the Proceedings, 26–30 November 2021, Madrid, Spain*. <https://www.ipu.org/file/13416/download>.



Demonstran memegang plakat saat protes terhadap kudeta militer, di dekat KBRI Yangon pada 26 Februari 2021. Foto: Allegra Mendelson/ Southeastasiaglobe.com/<https://southeastasiaglobe.com/asean-intervention-myanmar/>

Council IPU ke-209 memutuskan untuk terus mengundang CRPH sebagai mitra utama IPU dalam kapasitas pengamat *non-voting* di berbagai pertemuan IPU.⁹ Keputusan ini menunjukkan dukungan berkelanjutan IPU terhadap CRPH, meskipun parlemen Myanmar itu tidak dapat berfungsi penuh. Sidang tersebut juga menekankan pentingnya demokrasi dan mendorong Myanmar untuk kembali ke jalur demokrasi. Melanjutkan dukungan ini, pada Sidang Umum IPU ke-145 di Kigali, Rwanda, IPU kembali menegaskan bahwa junta militer Myanmar tidak diakui, dan CRPH tetap

⁹ Inter-Parliamentary Union. (2022). *144th IPU Assembly and Related Meetings, Results of the Proceedings, 20–24 March 2022, Nusa Dua, Indonesia*. <https://www.ipu.org/file/14295/download>.



diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan IPU sebagai pengamat,¹⁰ memperkuat posisi internasional CRPH di tengah krisis yang berlanjut.

Melalui pembentukan CRPH, rakyat Myanmar memiliki perwakilan sah yang terus berjuang untuk kembalinya demokrasi dan pemerintahan sipil. CRPH tidak hanya melambangkan perlawanan terhadap kediktatoran militer, tetapi juga harapan rakyat Myanmar untuk masa depan yang lebih baik, ketika hak-hak asasi manusia dihormati dan aspirasi demokrasi terpenuhi. Dukungan bagi CRPH dari komunitas parlemen dunia juga mencerminkan solidaritas global terhadap perjuangan rakyat Myanmar, menegaskan pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan kemanusiaan di seluruh dunia.

DPR RI - CRPH

Komunikasi dan dialog aktif DPR RI dengan CRPH memiliki nilai strategis yang sangat penting, dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan ASEAN. Sebagai negara yang memiliki peran sentral di ASEAN, Indonesia melalui DPR RI telah menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung upaya pemulihan demokrasi di Myanmar. Keterlibatan ini tidak hanya penting untuk kepentingan stabilitas regional, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin di kawasan yang berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, dan pemerintahan

¹⁰ Inter-Parliamentary Union. (2022). *154th IPU Assembly and Related Meetings, Results of the Proceedings, 11–15 October 2022, Kigali, Rwanda*. <https://www.ipu.org/file/15800/download>

yang konstitusional. Stabilitas kawasan Asia Tenggara sangat bergantung pada penyelesaian damai dari krisis di Myanmar, dan Indonesia telah berperan sebagai mediator dan fasilitator utama dalam upaya ini. Oleh karena itu, keterlibatan DPR RI dengan CRPH, sebagai representasi sah rakyat Myanmar, menjadi sangat penting untuk mendukung transisi kembali ke pemerintahan yang demokratis dan stabil di Myanmar.

Tidak hanya sekedar mengakui CRPH sebagai representasi rakyat Myanmar yang sah, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melalui fungsi diplomasi parlemen juga telah secara aktif menjalin komunikasi dan membangun dialog langsung dengan CRPH. Pada Februari 2022, BKSAP mengadakan dialog bilateral dengan CRPH, sebagai salah satu contoh nyata yang menunjukkan bahwa DPR RI telah mengambil peran proaktif dalam mendukung transisi demokrasi di Myanmar. Dialog yang diadakan secara virtual dengan dukungan dari ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan Westminster Foundation for Democracy (WFD) ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi Anggota DPR RI terkait situasi terkini di Myanmar, memberikan dukungan dan solidaritas, serta mengeksplorasi potensi kerja sama lebih lanjut antar-ke dua parlemen.

Sebagai representasi rakyat Indonesia, DPR RI memiliki tanggung jawab untuk menjalankan diplomasi parlemen yang inklusif, berinteraksi dengan entitas yang mewakili suara



rakyat—dalam hal ini CRPH, yang terpilih melalui Pemilu 2020 dan mewakili seluruh spektrum masyarakat Myanmar, termasuk kelompok etnis yang selama ini terpinggirkan. Diplomasi parlemen menjadi semakin penting ketika pemerintah Myanmar saat ini berada di bawah kendali militer, yang telah menyebabkan penderitaan dan tercerabutnya hak-hak rakyat Myanmar. Melalui interaksi langsung dengan CRPH, DPR RI menegaskan komitmen untuk mendukung demokrasi dan kemanusiaan di Myanmar.



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam virtual meeting dengan CRPH menuntut junta militer untuk segera memulihkan demokrasi. Foto: Dok. BKSAP.

Pada dialog bilateral tersebut, CRPH diwakili oleh H.E. Aung Kyi Nyunt, anggota Parlemen Myanmar yang terpilih pada Pemilu 2020, dan saat ini menjabat sebagai Ketua CRPH. Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon, menyampaikan pentingnya menciptakan Asia Tenggara yang stabil, aman, dan damai sebagai kunci utama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di kawasan. Ia menekankan bahwa krisis di

Myanmar dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, bahkan berpotensi mendestabilisasi kawasan. Oleh karena itu, DPR RI dengan cepat merespons situasi di Myanmar dengan menuntut junta militer untuk segera memulihkan demokrasi dan memastikan keselamatan rakyat Myanmar.

Dalam konteks ini, DPR RI tidak hanya berperan sebagai pemantau pasif, tetapi juga sebagai aktor yang aktif mendorong implementasi penuh dari Konsensus Lima Poin ASEAN (*Five-Point Consensus/5PC*), yang disepakati oleh para pemimpin regional ASEAN pada 2021. Melalui berbagai forum parlemen seperti AIPA, Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), dan IPU, DPR RI telah secara konsisten menyuarakan pentingnya implementasi 5PC tersebut. Dalam dialog bilateral dengan CRPH tersebut, BKSAP DPR RI juga berkomitmen untuk terus mendesak agar militer Myanmar segera melaksanakan konsensus ini sebagai langkah awal untuk memulihkan stabilitas dan demokrasi di Myanmar.

Dialog aktif DPR RI dengan CRPH juga merupakan upaya strategis untuk menjaga dan memperkuat sentralitas ASEAN dalam menyelesaikan krisis di Myanmar. Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa ASEAN tetap menjadi kekuatan utama dalam menangani isu-isu regional. Melalui keterlibatan aktif dengan CRPH, DPR RI membantu memastikan bahwa ASEAN tidak kehilangan relevansinya dalam upaya penyelesaian konflik ini.



Pada pertemuan bilateral lainnya dengan CRPH, tepatnya di sela Sidang Umum IPU ke-147 di Luanda, Angola, pada Oktober 2023, DPR RI kembali menegaskan pentingnya implementasi 5PC ASEAN dan memberikan dukungan terhadap CRPH sebagai representasi sah rakyat Myanmar. Pertemuan ini juga menyoroti upaya DPR RI untuk terus memantau situasi di Myanmar, dan memastikan bahwa ASEAN tetap terlibat secara aktif dalam mencari solusi damai bagi krisis ini. Delegasi CRPH saat itu diketuai oleh Win Myat Aye, yang pada sesi Debat Umum IPU juga menyerukan pada parlemen dunia untuk mendesak pemerintah mereka masing-masing dalam memberikan tekanan pada junta, serta



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat berpidato di sela-sela memimpin delegasi Indonesia pada Sidang Umum IPU ke-147 di Luanda, Angola.

Foto: Istimewa

memberikan bantuan, baik dalam bentuk keuangan dan teknis kepada pemerintahan terasing yang demokratis.

Kemudian pada Sidang Umum IPU ke-148 di Jenewa, Swiss, pada Maret 2024, delegasi DPR RI kembali mengadakan pertemuan bilateral dengan CRPH untuk membahas perkembangan terbaru di Myanmar dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat kerja sama antara kedua parlemen. Dalam pertemuan ini, DPR RI juga menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung upaya CRPH dalam mengakhiri kekuasaan militer di Myanmar dan memulihkan demokrasi di negara tersebut.

Lebih lanjut, DPR RI telah berkomitmen untuk terus menggunakan platform multilateral dan regional, termasuk IPU dan AIPA, untuk mendorong dialog dan negosiasi yang konstruktif antara CRPH dan komunitas internasional. DPR RI juga berupaya untuk memperluas basis dukungan internasional bagi CRPH, baik melalui kerja sama dengan parlemen-parlemen lain di kawasan maupun melalui forum-forum internasional lainnya. Melalui upaya ini, DPR RI berperan penting dalam memastikan bahwa suara rakyat Myanmar tetap didengar dunia, dan bahwa krisis ini tidak diabaikan oleh komunitas internasional.

Selain upaya diplomasi parlemen yang telah disebutkan di atas, DPR RI juga berupaya mengambil langkah konkret dalam mendukung CRPH. Dalam dialog bilateral pada 8 Februari



2022, kedua parlemen mendiskusikan berbagai langkah yang dapat diambil untuk memperkuat kerja sama antara kedua pihak. Salah satu hasil dari dialog ini adalah penunjukan *focal points* dari DPR RI dan CRPH untuk memastikan komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan.

DPR RI juga telah memberikan dukungan moral yang signifikan kepada CRPH, dengan menyoroti pentingnya pengalaman Indonesia dalam transisi demokrasi sebagai inspirasi bagi Myanmar. Dalam berbagai pertemuan bilateral tersebut, anggota CRPH menyatakan bahwa mereka melihat Indonesia sebagai contoh sukses dalam transformasi dari pemerintahan militer ke demokrasi yang stabil. Mereka berharap bahwa dengan dukungan dari Indonesia, Myanmar juga dapat mencapai transformasi serupa.

Selain itu, DPR RI juga telah berperan dalam mendorong komunitas internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang non-diskriminatif kepada rakyat Myanmar. Pada berbagai kesempatan bilateral, CRPH menekankan pentingnya memastikan bahwa bantuan kemanusiaan tidak disalurkan melalui junta militer, tetapi melalui saluran yang dapat dipercaya seperti NUG, dan lembaga terkait lainnya di pemerintahan terasing tersebut. DPR RI sepakat dengan pandangan ini, dan berjanji untuk terus mendorong komunitas internasional agar mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Dalam konteks ini, peran DPR RI menjadi sangat penting, tidak hanya dalam

mendukung transisi demokrasi di Myanmar, tetapi juga dalam memastikan bahwa rakyat Myanmar menerima bantuan yang mereka butuhkan tanpa campur tangan rezim militer.

Dialog, kerja sama, dan pembangunan keterlibatan DPR RI dengan CRPH juga diharapkan dapat menjadi katalisator bagi terciptanya dialog yang lebih konstruktif di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Myanmar. Pada setiap pertemuan dengan representasi CRPH, DPR RI selalu menekankan pentingnya mengupayakan solusi damai melalui dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan, menegaskan komitmen bahwa dialog merupakan jalan terbaik untuk mencapai solusi damai dan resolusi yang berkelanjutan. Dengan mengedepankan diplomasi parlemen, DPR RI juga berpotensi untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara CRPH, komunitas internasional, dan bahkan pihak-pihak yang berseberangan di Myanmar. Di tingkat regional, kerja sama DPR RI dengan CRPH diharapkan dapat memperkuat solidaritas, memicu dukungan yang lebih luas dari negara-negara ASEAN lainnya untuk mendukung upaya demokratisasi di Myanmar.

Melalui keterlibatan yang berkelanjutan dengan CRPH, DPR RI telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung upaya internasional dalam mengakhiri krisis di Myanmar, serta memulihkan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dengan terus melanjutkan upaya ini, DPR RI diharapkan dapat memainkan peran yang semakin penting



dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi di seluruh kawasan Asia Tenggara.

Ke depan, kerja sama DPR RI dengan CRPH tidak hanya diharapkan dapat menyelesaikan krisis yang ada, tetapi juga membentuk fondasi bagi masa depan yang lebih stabil dan demokratis bagi masyarakat Myanmar. Melalui diplomasi parlemen yang inklusif, dukungan regional yang kuat dan kontribusi dalam mengatasi krisis kemanusiaan, DPR RI berharap dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan, serta turut memastikan bahwa suara rakyat Myanmar tetap didengar di panggung internasional.





FOTO: [HTTPS://JPS.NET/EN/STORY/BANGLADESH-THE-POWER-OF-HOPE-A-CHILD-FRIENDLY-SPACE/](https://jps.net/en/story/bangladesh-the-power-of-hope-a-child-friendly-space/)

07 Jalan Terjal Diplomasi DPR tentang Krisis di Myanmar

Selama ini upaya diplomasi perdamaian masih didominasi oleh peran pemerintah/eksekutif dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, diplomasi dewasa ini mengenal konsep yang disebut *multitrack diplomacy*, yang menempatkan aktor non-pemerintah seperti parlemen, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil sebagai aktor diplomasi.

Diplomasi parlemen muncul dan memiliki peranan yang semakin penting dan strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan global. Dalam buku Stavridis dan Jancic, *Parliamentary Diplomacy in European and Global Governance* (2017), dijelaskan bahwa ada banyak jenis diplomasi, termasuk diplomasi ekonomi, diplomasi budaya, diplomasi publik, paradiplomasi, diplomasi olahraga, diplomasi selebritas, dan diplomasi parlemen.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MD3, DPR RI memiliki wewenang untuk

melakukan diplomasi parlemen melalui BKSAP. Sesuai dengan amanat undang-undang, tujuan diplomasi parlemen yang dijalankan oleh BKSAP adalah untuk meningkatkan diplomasi pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar. Sebenarnya, isu-isu yang dibahas dalam forum antar-parlemen adalah masalah yang menarik perhatian internasional dan kepentingan nasional Indonesia dalam jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu, diplomasi parlemen sangat penting untuk mempromosikan kepentingan dan perspektif Indonesia di tingkat internasional. Ini juga memastikan bahwa kebijakan nasional selaras dengan dinamika internasional dan menerjemahkan komitmen global ke dalam kebijakan nasional.

Diplomasi dikenal memiliki fungsi sebagai salah satu sarana dalam mencapai kepentingan nasional dalam interaksi dengan negara lain atau di lingkungan internasional. Namun, fungsi diplomasi tidak hanya dipergunakan untuk mencapai kepentingan nasional semata, tetapi juga untuk mewujudkan kepentingan bersama yang berasaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, diplomasi memiliki peranan yang penting dalam proses menciptakan perdamaian dan menjaga keamanan di lingkup kawasan maupun internasional.

Kritik terhadap Asas Non-Intervensi ASEAN

Krisis kemanusiaan dan politik yang terjadi di Myanmar juga menjadi perhatian Indonesia sebagai bagian dari ASEAN. Namun, Indonesia mengkritik prinsip non-intervensi ASEAN



karena menimbulkan keterbatasan dan lambatnya upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah negara-negara ASEAN dalam merespons krisis di Myanmar. Untuk itu, diperlukan diplomasi untuk mengatasi masalah tersebut.

Diplomasi parlemen memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pertemuan diplomatik yang mewakili pemerintah. Fleksibilitas dalam diplomasi parlemen ini dimanfaatkan oleh DPR untuk memecah kebuntuan dalam diplomasi, membuka jalan bagi berbagai kebijakan dan solusi baru bagi persoalan di Myanmar.

Indonesia menjadi salah satu negara yang terus menyuarakan isu Rohingya dan mendorong pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sejak tahun 2015, Indonesia telah banyak memberikan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Rohingya berupa makanan, obat-obatan, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta menjembatani dialog antara pemerintah Myanmar dan Bangladesh terkait repatriasi pengungsi Rohingya.¹ Akan tetapi, prinsip non-intervensi dalam Piagam ASEAN membatasi Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk tidak bertindak lebih jauh dan mencampuri urusan dalam negeri Myanmar. Oleh karena itu, peran DPR yang memiliki fleksibilitas dalam diplomasinya, diharapkan dapat memberikan respons yang lebih proaktif dalam penyelesaian krisis di Myanmar.

1 Ihsan Ainurrofiq & Muhammad Tri Andika Kurniawan. (2022). Diplomasi Parlemen: Peran DPR-RI Dalam Menanggapi Isu Pelanggaran HAM Kaum Rohingya Di Myanmar Tahun 2017-2018. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 11. DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.10093>.



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat memberikan bantuan di Posko pengungsi Rohingya di Cox's Bazar. Foto: Dok. Fadli Zon

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan agar segenap bangsa Indonesia turut berkontribusi dalam ketertiban dunia dan menjunjung asas kemanusiaan. Hal ini juga menjadi dasar dari pelaksanaan diplomasi parlemen yang dijalankan oleh DPR mengenai isu Myanmar. Dapat dikatakan bahwa upaya diplomasi DPR yang ditujukan bagi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Rohingya merupakan bagian dari diplomasi kemanusiaan. Parlemen Indonesia secara aktif menyuarakan penyelesaian konflik secara damai di Rakhine State, Myanmar, dan mendorong penghormatan HAM masyarakat Rohingya melalui berbagai resolusi di forum-forum regional dan Internasional.



DPR, dalam berbagai kesempatan, menyampaikan secara kritis bahwa permasalahan yang menimpa masyarakat Rohingya bukan semata tentang konflik agama, tetapi lebih mendasar dan mengarah kepada tragedi kemanusiaan dan pelanggaran HAM. DPR juga menekankan bahwa krisis yang terjadi di Rakhine State bukan lagi permasalahan domestik seperti yang diklaim oleh pihak Myanmar. Migrasi pengungsi Rohingya tidak hanya terjadi di perbatasan dengan Bangladesh, tetapi juga sampai ke perbatasan Thailand, Malaysia, dan juga Indonesia. Oleh karenanya, permasalahan pengungsi Rohingya sudah sepatutnya dipandang sebagai krisis di kawasan dan isu internasional.

DPR secara konsisten melakukan upaya untuk mendorong penyelesaian krisis Myanmar melalui pengajuan rancangan resolusi di forum AIPA dan APPE. Dalam Sidang Umum AIPA ke-41 di Vietnam tahun 2020, DPR RI mengajukan dua paragraf terkait Rohingya pada sidang Komite Politik AIPA. Usulan paragraf tersebut berisikan dorongan bagi Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan, menjamin proses repatriasi yang aman dan bermartabat bagi para pengungsi Rohingya di Rakhine. Namun, usulan ini ditentang keras oleh delegasi parlemen Myanmar. Sidang AIPA yang menganut sistem konsensus akhirnya tidak berhasil mengadopsi rancangan resolusi ini sebagai produk politik yang seharusnya dapat menjadi acuan bagi parlemen negara-negara ASEAN untuk mengimplementasikannya secara nasional. Fadli Zon yang pada saat itu menjadi ketua

delegasi DPR menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap yang ditunjukkan oleh beberapa parlemen negara ASEAN ini.

Pada Sidang Umum AIPA ke-42 tahun 2021, DPR kembali mengajukan resolusi kepada Komite Politik untuk merespons krisis kemanusiaan di Myanmar. Namun, sidang kembali menolak rancangan resolusi tersebut untuk diadopsi dengan dalih asas non-intervensi di ASEAN. Kali ini DPR dengan tegas untuk ‘memboikot’ sidang Komite Politik AIPA dengan menolak seluruh rancangan resolusi yang diajukan pada sidang tersebut. DPR berpendapat bahwa AIPA tidak berfungsi sebagaimana mestinya apabila mengabaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar dan menganggap isu ini sebagai isu domestik untuk ditangani sendiri oleh Myanmar. Akibat boikot itu tidak ada satu pun resolusi politik yang dihasilkan dari sidang umum tersebut.

Tahun 2021 juga menjadi titik balik bagi kondisi demokrasi dan krisis kemanusiaan di Myanmar. Pemerintahan sipil yang dibentuk dari hasil pemilu tahun 2020 dianggap tidak sah dan diambil-alih oleh pemerintahan junta melalui jalur kudeta. Pembahasan mengenai krisis politik dan krisis kemanusiaan di Myanmar menjadi lebih mendesak untuk diselesaikan. DPR secara tegas mendukung upaya pemerintah Indonesia dan negara ASEAN lainnya terkait dengan penerapan *Five-Point Consensus* yang mendesak dilakukannya pemilu dan mengembalikan pemerintahan ke pihak sipil. DPR RI bahkan mengajukan perubahan sistem pengambilan keputusan dalam



organisasi AIPA menjadi sistem *voting* agar krisis Myanmar dapat segera ditangani.

Kudeta politik yang kemudian diikuti dengan pembubaran parlemen Myanmar membuat posisi Myanmar dalam organisasi internasional dianggap tidak sah. Status keanggotaan parlemen Myanmar di IPU telah dibekukan menyusul aksi kudeta militer tersebut. Selain itu, junta militer Myanmar juga tidak diperkenankan untuk hadir dan mewakili parlemen dalam Sidang Umum AIPA ke-41 hingga sidang ke-44.²

“ DPR tetap berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah menjadi *peacemaker, problem solver, dan bridge builder* untuk dapat menyelesaikan krisis di Myanmar dan mendorong percepatan implementasi *Five-Point Consensus*.

DPR tetap berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah menjadi *peacemaker, problem solver, dan bridge builder* untuk dapat menyelesaikan krisis di Myanmar dan mendorong percepatan implementasi *Five-Point Consensus*. Diperlukan penyelesaian yang komprehensif apabila ASEAN dan AIPA ingin menyelesaikan permasalahan politik Myanmar dan krisis kemanusiaan yang dialami masyarakat Rohingya.

2 Kondisi pada saat buku ini disusun pada tahun 2024, sebelum Sidang Umum AIPA ke-45.

Pada Sidang Umum AIPA ke-43 di Kamboja, DPR RI kembali mengusulkan rancangan resolusi terkait Myanmar. Setelah proses negosiasi dan diplomasi yang dijalankan, DPR RI berhasil meyakinkan parlemen negara ASEAN untuk setuju mengadopsi resolusi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara, serta memasukkan krisis di Myanmar sebagai isu kawasan yang harus diselesaikan bersama. Pada sidang ke-43 ini resolusi yang diadopsi berjudul “*Promoting Peace, Solidarity, And Multilateralism through ASEAN Centrality*”. DPR RI mengajukan paragraf yang mendorong pihak-pihak terkait untuk menerapkan *Five-Point Consensus* dan mendorong upaya kolaborasi untuk penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Myanmar, termasuk masyarakat Rohingnya.

Secara spesifik Indonesia mengajukan rancangan resolusi yang berhasil diadopsi dengan judul “*Parliamentary Diplomacy for The Implementation of ASEAN Five-Point Consensus*”. Resolusi ini mendorong upaya nyata dari seluruh parlemen untuk mendukung dan mendorong pemerintah di negara masing-masing untuk memastikan prinsip *Five-Point Consensus* dijalankan.

Sidang Umum AIPA ke-44 diselenggarakan di Jakarta pada bulan Agustus 2023. Sebagai tuan rumah Indonesia secara konsisten membawa isu Myanmar. Implementasi *Five-Point Consensus* yang dinilai kurang optimal kembali didesak untuk dilaksanakan melalui dua resolusi yang berjudul “*Maintaining*



Pada Sidang Umum AIPA ke-44 DPR RI mendesak dibentuk komite khusus untuk perdamaian dan kemanusiaan di Myanmar. Foto: Dok. DPR RI.

Regional Peace, Security, and Stability through Dialogue and Collaboration” dan *“Parliamentary Cooperation in Contributing to Long-Lasting Peace in Myanmar”*. DPR RI mendesak dibentuknya komite khusus atau *ad hoc* untuk memastikan proses perdamaian dan upaya kemanusiaan untuk Myanmar dijalankan.

Selain memperjuangkan tercapainya perdamaian dan stabilitas di Myanmar dan kawasan ASEAN melalui resolusi politik, DPR juga secara aktif menjalin dialog dengan pihak-pihak terkait. Secara intensif DPR menjadi *partner* dialog dari Utusan Khusus PBB atau *UN Special Rapporteur on Human Rights on Myanmar* dan Komite Parlemen Myanmar di Pengasingan atau *Committee Representing the Pyidaungsu Hluttaw* (CRPH).

Melalui dialog-dialog ini, DPR menempatkan dirinya sebagai mediator guna terwujudnya perlindungan masyarakat sipil, pemulihan demokrasi dan pemeliharaan stabilitas kawasan di Asia Tenggara.



Secara intensif DPR menjadi partner dialog dari Utusan Khusus PBB atau *UN Special Rapporteur on Human Rights on Myanmar* dan Komite Parlemen Myanmar di Pengasingan atau *Committee Representing the Pyidaungsu Hluttaw* (CRPH).

Diplomasi DPR mengenai pemulihan kondisi di Myanmar tidak akan berhenti sampai pemerintahan junta melaksanakan isi dari *Five-Point Consensus* dan repatriasi serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Rohingya. Bahkan Fadli Zon, selaku Ketua BKSAP DPR, dalam berbagai kesempatan menyampaikan secara tegas bahwa ASEAN perlu mempertimbangkan sanksi tegas terkait keanggotaan Myanmar dalam organisasi ASEAN apabila *Five-Point Consensus* tidak kunjung dilaksanakan.

Setali tiga uang, mekanisme menempuh rekomendasi pembentukan komite/subkomite tambahan juga berpotensi mengalami kebuntuan mengingat anggota DPR RI yang mengusulkan resolusi pada AIPA ke-44, berpotensi tidak



dapat mengikuti perhelatan Sidang Umum AIPA ke-45 yang dijadwalkan pada 17-22 Oktober 2024 karena komposisi anggota DPR RI berubah. Anggota DPR RI periode 2019-2024 berakhir pada 30 September 2024. Per 1 Oktober 2024, keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 resmi dimulai. Dengan demikian, DPR akan mengalami kembali proses pembahasan pengisian alat kelengkapan DPR (AKD), yang diperkirakan berlangsung selama satu hingga dua bulan. Menggantungkan harapan kepada parlemen negara anggota lainnya menjadi tantangan dalam AIPA, mengingat dalam beberapa tahun ke belakang, hanya DPR RI yang relatif cukup lantang bersuara untuk isu Myanmar.





FOTO: FREEPIK



BAGIAN

**Myanmar dan
Pertaruhan ASEAN
ke Depan**



FOTO: FREEPIK

08 Pertaruhan Kredibilitas ASEAN

Melihat perkembangan dan potensi penyelesaian konflik yang sepertinya masih jauh panggang dari api, isu Myanmar menjadi pertaruhan bagi komunitas ASEAN dalam membawa konsep sentralitas komunitas tersebut. Konflik berdarah yang terjadi di Myanmar mengancam Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community/APSC*) yang divisikan terwujud pada 2025. Salah satu Visi ASEAN 2025 adalah perwujudan komunitas yang responsif dan inklusif yang memastikan rakyatnya menikmati kemerdekaan dasar dan hak asasi manusia (HAM) dan juga berkembang dalam lingkungan yang adil, demokratis, harmonis dan sensitif gender sejalan dengan prinsip demokrasi, tata kelola, dan *rule of law*.¹ Peristiwa Myanmar seolah menepis perwujudan visi tersebut, bahkan, pada titik ekstrem, membuka celah kelemahan ASEAN yang dapat dieksploitasi lebih lanjut oleh pihak luar untuk kepentingan mereka.

Munculnya *Five-Point Consensus* (5PC) dalam menyikapi situasi di Myanmar sebenarnya membawa harapan baru

¹ Lihat Poin 8.2 ASEAN Community Vision 2025, <https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/November/aec-page/ASEAN-Community-Vision-2025.pdf>

mengenai bagaimana komunitas regional ASEAN dapat mendorong penyelesaian masalah di negara tersebut. Namun, progres pelaksanaan 5PC tidak semudah membalik telapak tangan. ASEAN tetap bergulat dengan non-intervensinya, kendati arah politik luar negeri para negara anggota ASEAN (*ASEAN Member States/AMS*) menunjukkan urgennya penyelesaian isu Myanmar. Ini yang ditangkap komunitas parlemen AMS melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

Peran Diplomasi Parlemen ASEAN

Melalui Sidang Umum AIPA ke-44, Agustus 2023 di Jakarta, DPR RI mengusulkan perlunya komunitas parlemen ASEAN memantau pelaksanaan 5PC. Alasan utama yang mengemuka adalah AMS melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 telah menekankan perlunya mendorong perkembangan dalam pelaksanaan 5PC, penguatan kesatuan ASEAN dalam menentukan langkah berikutnya dalam krisis di Myanmar, dan pentingnya memfasilitasi bantuan kemanusiaan ke rakyat Myanmar. Meski demikian, AIPA pada kesempatan tersebut belum memutuskan mekanisme seperti apa yang diperlukan untuk pemantauan pelaksanaan 5PC. AIPA hanya menyepakati untuk menggali kemungkinan mewujudkan mekanisme (*possible suitable mechanism*) yang sesuai untuk isu Myanmar.

Bila dirunut lebih jauh, resolusi Sidang Umum AIPA ke-44 bertajuk *Parliamentary Cooperation in Contributing to Long-*



lasting Peace in Myanmar tersebut perlu diapresiasi sebagai pembuka jalan peningkatan peran diplomasi parlemen ke level selanjutnya. Yakni, sebagai pembangun *check and balances* mekanisme organisasi antarpemerintah di level regional. Namun, resolusi meninggalkan dua pertanyaan menggantung, yakni mekanismenya seperti apa dan bagaimana hal ini dapat diwujudkan serta siapa yang mewujudkan?

Resolusi menyerahkan perwujudan tindak lanjutnya pada ruang terbuka. Resolusi tersebut tidak memberi mandat ke



Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Sidang AIPA ke-44 di Jakarta.
Foto: Dok. DPR RI.

Sekretariat AIPA secara tegas untuk menindaklanjutinya. Yang berarti resolusi dimaksud adalah bentuk sikap AIPA secara keseluruhan. Untuk itu, parlemen negara anggota ASEAN yang perlu menindaklanjutinya. Lantas siapa?

Pada AIPA ke-44, resolusi dimaksud memiliki penyokong (sponsor), yakni Indonesia dengan tanpa penyokong lainnya, kendati disepakati seluruh anggota. Maka, parlemen negara anggota, khususnya DPR RI, berperan penting untuk melanjutkan sikap tersebut dengan menggali mekanisme yang memadai.

Tindak lanjutnya tentu bergantung pada mekanisme Sidang Umum AIPA berikutnya, yakni Sidang Umum AIPA ke-45 yang akan berada di bawah kepemimpinan Parlemen Lao PDR. Sidang Umum AIPA ke-45 akan diselenggarakan pada



Resolusi Sidang Umum AIPA ke-44 bertajuk *Parliamentary Cooperation in Contributing to Long-lasting Peace in Myanmar* tersebut perlu diapresiasi sebagai pembuka jalan peningkatan peran diplomasi parlemen ke level selanjutnya. Yakni, sebagai pembangun *check and balances* mekanisme organisasi antarpemerintah di level regional.



Oktober 2024. Momen tersebut akan menentukan bagi AIPA, apakah dapat bergerak lebih jelas untuk menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan menggantung tersebut.

Bila menilik Statuta AIPA, setidaknya ada beberapa mekanisme yang memungkinkan bagi AIPA untuk menindaklanjuti resolusi isu Myanmar.

Mekanisme pertama dengan menggunakan mekanisme *good offices* dari Presiden AIPA untuk merespons secara efektif dan tepat waktu mengenai isu yang mendesak dan situasi krisis yang memengaruhi ASEAN. *Good offices* (jasa-jasa baik) merupakan upaya penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga dalam memediasi situasi. Pasal 10.4 Statuta AIPA memungkinkan mekanisme tersebut dilakukan sepanjang isu yang diajukan adalah isu mendesak dan krisis yang berpengaruh ke ASEAN, dan dilakukan setelah sebelumnya berkonsultasi dengan para anggota AIPA.²

Mekanisme kedua dilakukan melalui dua hal, yakni pembentukan inisiatif baru untuk kegiatan AIPA dan pembentukan komite tetap, komite pendalaman, komite tujuan tertentu (*ad hoc committee*) atau subkomite dari yang telah ada. Pembahasan mengenai pembentukan inisiatif baru, sejalan dengan pasal 12.2 Statuta AIPA, cukup disepakati oleh Komite Eksekutif (*Executive Committee*). Sementara Komite Eksekutif perlu melakukan pembahasan rencana pembentukan komite/subkomite baru terlebih dahulu

² Lihat Statuta AIPA, <https://aipasecretariat.org/pages/statutes/>.

sebelum merekomendasikan inisiatif baru tersebut ke sidang umum (Pasal 12.5 AIPA Statuta).³

Mekanisme-mekanisme tersebut memerlukan peran parlemen anggota ASEAN agar dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut. Parlemen Lao PDR sebagai Presiden AIPA ke-45, memilih fokus utama sidang umum pada upaya pembangunan yang menitikberatkan pada konektivitas dan pertumbuhan yang inklusif. Dari sisi mekanisme *good offices* dan isu prioritas yang akan diambil, potensi memaksimalkan peran Presiden AIPA untuk isu Myanmar, belum terlihat jelas. Terlebih, Presiden AIPA harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan para anggota parlemen negara-negara ASEAN.

Bagi parlemen Indonesia (DPR RI), ada kebutuhan membentuk mekanisme yang memadai untuk mengisi potensi kekosongan peran diplomasi parlemen pada platform-platform antarparlemen mengingat parlemen Indonesia periode 2019-2024 akan berganti pada awal Oktober 2024. Langkah tersebut perlu dilakukan setidaknya untuk mengamankan peran aktif diplomasi parlemen DPR RI dalam menyampaikan argumennya di Komite Eksekutif AIPA.

Ruang yang memungkinkan untuk *mekanisme ketiga* adalah dengan mendorong peran Sekretariat AIPA untuk menggali dan mengonseptualisasikan kemungkinan program bersama dengan pemangku kepentingan lainnya demi mewujudkan tujuan bersama dengan AIPA. Melalui mekanisme ini, DPR

³ Ibid.



DPR RI perlu mendorong Sekretariat AIPA untuk berkolaborasi dengan lembaga pemerhati isu Myanmar. Foto: presidenri.go.id

RI perlu mendorong Sekretariat AIPA untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerhati isu Myanmar seperti International Institute for Strategic Studies (IISG), The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), bahkan ASEAN itu sendiri untuk mengembangkan semacam platform pemantauan pelaksanaan 5PC.





FOTO: PRESIDENRI.GO.ID

09 Tahun-Tahun Menentukan

Keberhasilan AIPA dalam membangun “mekanisme yang memungkinkan” untuk pemantauan pelaksanaan 5PC akan menjadi tonggak sejarah dalam perkembangan diplomasi parlemen regional. Untuk kali pertama, parlemen bersama-sama secara kawasan, turut mengawasi jalannya penyelesaian krisis di ASEAN.

Apabila berhasil, maka AIPA akan dapat memberi warna baru bagi Komunitas ASEAN di tengah-tengah rencana pembaruan visi regional mereka. Pada 2025, Dokumen Visi Komunitas ASEAN akan berakhir. Lao PDR sebagai Presiden ASEAN tengah berada dalam tahun-tahun yang menentukan untuk proses pembahasan Visi Komunitas ASEAN pasca-2025, yakni hingga 2045. AIPA oleh karenanya, perlu secara intensif terlibat dalam pembahasan dan penyusunan Visi Komunitas ASEAN 2045, termasuk di pilar-pilar yang ada.

Sementara pada saat yang sama, Lao PDR mengambil peran diplomasi yang sedikit berbeda dibandingkan beberapa pendahulunya. Pada Januari 2024, wakil Myanmar, Ms

Marlar Than Htike, Sekretaris Tetap untuk ASEAN pertama kalinya hadir di ASEAN Foreign Ministers' Retreat di Luang Prabang, Lao PDR setelah Myanmar “diasingkan” sejak 2021.¹

Melihat krusialnya peran parlemen dalam pembahasan visi pembangunan, DPR RI perlu menyikapinya dengan mendorong AIPA untuk terlibat lebih aktif dalam pembahasan Visi Komunitas ASEAN 2045. Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan visi komunitas yang responsif dan inklusif



Orang-orang yang tampak seperti Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine menjalani pelatihan senjata oleh personel militer junta pada 10 Maret 2024. Foto: Radio Free Asia/<https://www.rfa.org/english/news/myanmar/training-03112024175743.html>.

¹ Thompson Chau. (2024, 14 Maret). Thailand, Laos try to ‘make junta presentable’ amid ASEAN Myanmar inertia. *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2024/3/14/thailand-laos-try-to-make-junta-presentable-amid-asean-myanmar-inertia>.



bagi rakyatnya, dapat lebih diperkuat demi memastikan ASEAN adalah benar-benar untuk mereka semua—tidak hanya elite Asia Tenggara.

Selain itu, situasi di Myanmar juga berada dalam waktu-waktu yang menentukan, seiring meningkatnya gerakan perlawanan dari para kaum etnis Myanmar dengan tiga kelompok utama, yaitu Arakan Army (AA), Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA), dan Ta'ang National Liberation Army (TNLA). Mereka secara bersama-sama bergabung dalam The Brotherhood Alliance dan meluncurkan Operational 1027 sejak Oktober 2023. Akibat serangan tersebut, junta tersingkir dari sebagian besar wilayah di perbatasan Myanmar-Tiongkok.²

Peristiwa tersebut yang memicu kebijakan wajib militer (*conscription*) pada awal Februari 2024.³ Akibat kebijakan tersebut, banyak warga Myanmar yang berencana eksodus menghindari keterlibatan di militer.

Etnis Rohingya berpotensi paling terdampak akibat pembatasan pergerakan dan dipaksa bergabung ke tentara. UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk melaporkan bahwa pemuda Rohingya ditawarkan uang, makanan, bahkan kewarganegaraan jika bergabung dengan militer—junta yang sebelumnya menindas mereka bertahun-

2 Morgan Michaels. (2024, Juli). China pressures Myanmar opposition groups to halt latest offensive. IISS. <https://myanmar.iiss.org/updates/2024-07>.

3 Facing setbacks against resistance forces, Myanmar's military government activates conscription law. (2024). AP. <https://apnews.com/article/myanmar-military-army-draft-resistance-conflict-conscription-45138c3c465609ff4b4fb39c696252d7>.

tahun.⁴ Junta militer diperkirakan akan meraih sedikitnya 15.000 tentara baru pada akhir 2024.⁵

Adalah hal yang ironis apabila pada masa-masa tragedi Rohingya menyeruak, publik disuguhkan peran junta yang membantai mereka. Sementara saat ini, junta militer justru membutuhkan kehadiran Rohingya sebagai garda depan mereka. Ini menunjukkan, peran junta memanfaatkan Rohingya sebagai perisai hidup atau bidak catur semata dalam perebutan wilayah di Myanmar.

Junta Myanmar juga mengumumkan rencana pemilu sebagai prioritas yang akan diselenggarakan secepatnya. Lima Poin Peta Jalan (*Five Points Roadmap*) yang disusun junta telah diperbarui dengan meningkatkan prioritas pemilu dari urutan ketiga menjadi pertama.⁶ Sementara Pemerintahan Pengasingan yang lazim disebut National Unity Government (NUG), pada 8 Agustus 2024, menyatakan hari-hari terakhir kediktatoran militer segera tiba, menunjukkan klaim yang optimistis akan segera berakhirnya junta militer.⁷

Terlepas dari potensi rekonsiliasi atau prospek perdamaian di Myanmar, ASEAN telah menegaskan 5PC sebagai referensi

4 Office of the High Commissioner for Human Rights. (2024, 1 Maret). *Myanmar: human rights situation has 'morphed into a never-ending nightmare,' says Türk*. <https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2024/03/myanmar-human-rights-situation-has-morphed-never-ending-nightmare>

5 Morgan Michaels. (2024, Juli). China pressures Myanmar opposition groups to halt latest offensive. IISS. <https://myanmar.iiss.org/updates/2024-07>

6 Banyar Aung. (2023, 30 Agustus). What do Changes in Myanmar Regime's Roadmap and Objectives Mean? *The Irrawaddy*. <https://www.irrawaddy.com/news/burma/what-do-changes-in-myanmar-regimes-roadmap-and-objectives-mean.html>

7 NUG Myanmar. (2024, 24 Agustus). *Republic of the Union of Myanmar National Unity Government Weekly Update (33/2024)*. <https://assets-gov.nugmyanmar.org/images/2024/08/WB-33E-24.pdf>



utama penyelesaian situasi Myanmar. ASEAN telah pula menegaskan, termasuk dalam *Joint Communique* pertemuan Menlu ASEAN ke-57 di Vientiane, 25 Juli 2024, bahwa penyelesaian damai yang inklusif dan awet harus dalam konteks *Myanmar-owned and Myanmar-led*.⁸

Namun demikian, siapa yang *owned* dan *led* dari Myanmar? Apakah junta? Apakah kelompok-kelompok etnis di Myanmar?

“ Adalah hal yang ironis apabila pada masa-masa tragedi Rohingya menyeruak, publik disuguhkan peran junta yang membantai mereka. Sementara saat ini, junta militer justru membutuhkan kehadiran Rohingya sebagai garda depan mereka. Ini menunjukkan, peran junta memanfaatkan Rohingya sebagai perisai hidup atau bidak catur semata dalam perebutan wilayah di Myanmar.

Terlebih ketika mengetahui perang sipil di Myanmar tidak hanya terjadi antara junta dengan milisi kelompok etnis, tetapi juga terindikasi terjadi antarkelompok etnis yang berseberangan dan berebut pengaruh dalam mengelola

⁸ <https://www.laoschairmanship2024.gov.la/joint-communicue-of-the-57th-asean-foreign-ministers-meeting-vientiane-25-july-2024/>

sumber daya dan juga akses perdagangan.⁹ Sebagai catatan, Myanmar adalah negara yang sangat kaya dengan kandungan mineral giok, batu kapur, safir, dan batu delima.¹⁰ Myanmar dikenal sebagai produsen terbesar dunia untuk giok.

Maka, fase penyelesaian damai, jika itu terjadi dalam waktu tidak begitu lama, perlu dibarengi dengan peran-peran lanjutan dari ASEAN hingga aktor-aktor lain, seperti parlemen dalam membantu dan mendukung Myanmar untuk bertransisi menjadi pemerintahan sipil yang inklusif dan memberikan perlindungan setara terhadap seluruh etnis termasuk Rohingya dan warga yang tinggal di negaranya. Jalan di depan masih akan terjal. Bahkan, apabila pemerintahan sipil kembali berkuasa di Myanmar.



9 Morgan Michaels. (2024, Juli). China pressures Myanmar opposition groups to halt latest offensive. IISS. <https://myanmar.iiss.org/updates/2024-07>.

10 Kyaw Kyaw Ohn. (n.d.). Geology & Mineral Resources of Myanmar. <https://www.cgs.gov.cn/upload/201510/20151020/20151020214113776.pdf>.

Referensi

- Acharya, A. (2017, Agustus). The Myth of ASEAN Centrality? Contemporary Southeast Asia, Vol. 39, No. 2 (August 2017), hal. 273-279.
- Ahmed, H.U. (2019, 27 Juli). A historical overview of the Rohingya crisis. *Dhaka Tribune*. <https://www.dhakatribune.com/opinion/longform/183315/a-historical-overview-of-the-rohingya-crisis>.
- Ainurrofiq, I. & Kurniawan, M.T.A. (2022). Diplomasi Parlemen: Peran DPR-RI. Dalam Menanggapi Isu Pelanggaran HAM Kaum Rohingya Di Myanmar Tahun 2017-2018. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 11. DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.10093>.
- All Arakan Students' and Youths' Congress. (n.d.). *History & Geography: Brief History of Arakan*. <https://aasyc.org/history-geography/>.
- ASEAN Lao PDR. (2024, 25 Juli). *Joint Communiqué of the 57th ASEAN Foreign Ministers' meeting vientiane, 25 july 2024*. <https://www.laoschairmanship2024.gov.la/joint-communication-of-the-57th-asean-foreign-ministers-meeting-vientiane-25-july-2024/>.
- Asean.org. (n.d.). *ASEAN Community Vision 2025*. <https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/November/aec-page/ASEAN-Community-Vision-2025.pdf>.
- Asrar, S. (2017, 28 Oktober). Rohingya crisis explained in maps. *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2017/10/28/rohingya-crisis-explained-in-maps>.

- Asril, S. (2017, 16 Oktober). Kalahkan Isu Nuklir Korut, Indonesia “Golkan” Isu Rohingya Jadi Resolusi IPU”. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/16/11024631/kalahkan-isu-nuklir-korut-indonesia-golkan-isu-rohingya-jadi-resolusi-ipu?page=all>.
- Aung, B. (2023, 30 Agustus). What do Changes in Myanmar Regime’s Roadmap and Objectives Mean? *The Irrawaddy*. <https://www.irrawaddy.com/news/burma/what-do-changes-in-myanmar-regimes-roadmap-and-objectives-mean.html>.
- Bepler, S. (2018). The Rohingya conflict: Genesis, current situation and geopolitical aspects. *Pacific Geographies*, July/August 2018.
- Bicer, A. (2024, 4 Juli). ICJ allows 7 states to intervene in Gambia’s genocide case against Myanmar. *Aa.com.tr*. <https://www.aa.com.tr/en/world/icj-allows-7-states-to-intervene-in-gambia-bias-genocide-case-against-myanmar/3265584>.
- Budilaksono, I. (2020, 10 September). DPR: AIPA sepakat selesaikan COVID-19 dan konflik LCS secara bersama. *Antaranews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/1719194/dpr-ai-pa-sepakat-selesaikan-covid-19-dan-konflik-lcs-secara-ber-sama>.
- Bustamam, R. (2013). Jejak Komunitas Muslim di Burma: Fakta Sejarah yang Terabaikan. *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2013, hal. 309 - 338.
- Chau, T. (2024, 14 Maret). Thailand, Laos try to ‘make junta presentable’ amid ASEAN Myanmar inertia. *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2024/3/14/thailand-laos-try-to-make-junta-presentable-amid-asean-myanmar-inertia>.
- Clare, A. (2021, 2 Juli). The Myanmar coup: a quick guide. Parliament of Australia. https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp2122/Quick_Guides/MyanmarCoup.
- Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw. (2021). *Formation and Mandate*. <https://crphmyanmar.org/history-and-formation-of-crph/>.



- Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw. (2021). *Functions of CRPH*. <https://crphmyanmar.org/functions/>.
- Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw. (2021). *History and Formation of CRPH*. <https://crphmyanmar.org/history-and-formation-of-crph/>.
- Denisov, I., Paramonov, O., & Safranchuk, I. (2021, 15 Maret). Russia, China, and the concept of Indo-Pacific. *Journal of Eurasian Studies*, 12(1), 72-85. <https://doi.org/10.1177/1879366521999899>.
- Elaine Chan. (2024, 3 September). Rohingya. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/Rohingya>.
- European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. (2024, 31 Januari). *5 things you need to know about Myanmar's humanitarian crisis*. https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/stories/5-things-you-need-know-about-myanmars-humanitarian-crisis_en.
- European Foundation for South Asian Studies (EFSAS). (2018, Mei). *The Rohingya Issue – Its wider ramifications for South Asia*. <https://www.efsas.org/publications/study-papers/the-rohingya-issue-%E2%80%93-its-wider-ramifications-for-south-asia/>.
- Facing setbacks against resistance forces, Myanmar's military government activates conscription law. (2024). *AP*. <https://apnews.com/article/myanmar-military-army-draft-resistance-conflict-conscription-45138c3c465609ff4b4fb39c696252d7>.
- Fakta-fakta Baru Perang Saudara di Myanmar, Junta Semakin Kewalahan. (2024, 24 April). *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240423152222-106-1089512/fakta-fakta-baru-perang-saudara-di-myanmar-junta-semakin-kewalahan>.
- Fakta-fakta Terbaru 3 Tahun Perang Saudara di Myanmar. (2024, 6 April). *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240406091303-106-1083694/fakta-fakta-terbaru-3-tahun-perang-saudara-di-myanmar>.

- Fukushima, A. (2018, 30 November). The Quad As a Caucus for Co-operation. *Real Clear Defense*. https://www.realcleardefense.com/articles/2018/11/30/the_quad_as_a_caucus_for_cooperation_113992.html.
- Hein, Y.M. (2024, 30 April). Nine Things to Know About Myanmar's Conflict Three Years On. *United States Institute of Peace*. <https://www.usip.org/publications/2024/04/nine-things-know-about-myanmars-conflict-three-years>.
- Hensengerth, O. (2005). The Burmese Communist Party and the State-to-State Relations between China and Burma. *Leeds East Asia Papers*. Archived from the original (PDF) on 28 May 2008.
- Human Right Watch. (2022, 14 Februari). *Developments in Gambia's Case Against Myanmar at the International Court of Justice*. <https://www.hrw.org/news/2022/02/14/developments-gambias-case-against-myanmar-international-court-justice>.
- Idrus, P.G. (2022, 26 Juli). Sejarah kudeta berdarah junta Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi. *Aa.com.tr*. <https://www.aa.com.tr/id/regional/sejarah-kudeta-berdarah-junta-myanmar-terhadap-aung-san-suu-kyi/2646006>.
- India Operationalizes Sittwe Port in Myanmar. (2023, 8 Mei). *Civildaily*. <https://www.civildaily.com/news/india-operationalizes-sittwe-port-myanmar/>.
- Inter-Parliamentary Union. (2021). *142nd IPU Assembly and Related Meetings, Results of the Proceedings, 24–27 May 2021, Virtual Session*. <https://www.ipu.org/file/11849/download>.
- Inter-Parliamentary Union. (2021). *143rd IPU Assembly and Related Meetings, Results of the Proceedings, 26–30 November 2021, Madrid, Spain*. <https://www.ipu.org/file/13416/download>.
- Inter-Parliamentary Union. (2022). *144th IPU Assembly and Related Meetings, Results of the Proceedings, 20–24 March 2022, Nusa Dua, Indonesia*. <https://www.ipu.org/file/14295/download>.



- Inter-Parliamentary Union. (2022). *154th IPU Assembly and Related Meetings, Results of the Proceedings, 11–15 October 2022, Kigali, Rwanda*. <https://www.ipu.org/file/15800/download>.
- Janti, N. (2017, 4 September). Aung San Suu Kyi Menulis Sejarah Arakan. *Historia.id*. <https://historia.id/agama/articles/aung-san-suu-kyi-menulis-sejarah-arakan-PdWY0/page/1>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2009, 5 September). *Piagam ASEAN*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/117/halaman_list_lainnya/piagam-asean.
- Kementerian PANRB. (2023, 13 Juli). *Menlu RI Ingatkan Peran ASEAN dalam Tantangan Geopolitik*. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menlu-ri-ingatkan-peran-asean-dalam-tantangan-geopolitik>.
- Library of Congress. (2021). *Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw*. <https://www.loc.gov/item/lcwaN0035764/>.
- Mendelson, A. (2021, 12 Maret). Vying for legitimacy as Myanmar's recognised government, who are the CRPH? *Southeast Asia Globe*. <https://southeastasiaglobe.com/crph-myanmar/>.
- Michaels, M. (2024, Juli). China pressures Myanmar opposition groups to halt latest offensive. *IISS*. <https://myanmar.iiss.org/updates/2024-07>.
- Miller, M.C. (2023, 22 Agustus). Cooperation Between ASEAN and the Quad is Critical for Indo-Pacific Stability. *Council on Foreign Relations*. <https://www.cfr.org/blog/cooperation-between-asean-and-quad-critical-indo-pacific-stability>.
- Minar, S.J., & Halim, A. (2020, September). The Rohingyas of Rakhine State: Social Evolution and History in the Light of Ethnic Nationalism. *Social Evolution & History*, Vol. 19 No. 2. DOI: 10.30884/seh/2020.02.06.
- Myanmar National Portal. (n.d.). *A brief history of Myanmar*. <https://www.myanmar.gov.mm/web/guest/history>.

- Myanmar: 13 security forces members killed in clash with anti-coup bloc's defense force. (2021, 24 Mei). *ANI*. <https://www.aninews.in/news/world/asia/myanmar-13-security-forces-members-killed-in-clash-with-anti-coup-blocs-defence-force20210524083029/>.
- NUG Myanmar. (2024, 24 Agustus). *Republic of the Union of Myanmar National Unity Government Weekly Update (33/2024)*. <https://assets-gov.nugmyanmar.org/images/2024/08/WB-33E-24.pdf>.
- Office of the High Commissioner for Human Rights. (2024, 1 Maret). *Myanmar: human rights situation has 'morphed into a never-ending nightmare,' says Türk*. <https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2024/03/myanmar-human-rights-situation-has-morphed-never-ending-nightmare>.
- Ohn, K.K. (n.d.). *Geology & Mineral Resources of Myanmar*. *CGS.gov.cn*. <https://www.cgs.gov.cn/upload/201510/20151020/20151020214113776.pdf>.
- Oo, Z. (2020, 17 Februari). Myanmar's five Ms: misunderstanding, mistrust, misinterpretation, misconception and mistreatment. *The Strategist*. <https://www.aspistrategist.org.au/myanmars-five-ms-misunderstanding-mistrust-misinterpretation-misconception-and-mistreatment/>.
- Peace Research Institute Oslo. (2023). *Counting Myanmar's Dead: Reported Civilian Casualties since the 2021 Military Coup*.
- Rahman, Md. M. (2024, 9 Juli). Statelessness – the Root Cause of the Rohingya Crisis – Needs to Be Addressed. *News Lines Institutes*. <https://newlinesinstitute.org/state-resilience-fragility/statelessness-the-root-cause-of-the-rohingya-crisis-needs-to-be-addressed/>.
- Smith, M. (1991). *Burma: Insurgency and the politics of ethnicity* (1st ed.). London and New Jersey: Zed Books.



- Sorong, T.P. (2022, 20 Mei). Mengenal Quad, “NATO di Asia” Buat Seruduk China? *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220520180946-4-340589/mengenal-quad-nato-di-asia-buat-seruduk-china>.
- Steinberg, D.I., et al. (2024, 30 Agustus). The emergence of nationalism: History of Myanmar. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/place/Myanmar/The-emergence-of-nationalism>.
- The Association of Southeast Asian Nations. (n.d.). *The Founding of ASEAN*. <https://asean.org/the-founding-of-asean/>.
- The Border Consortium. (2024). *Annual Report 2023*. https://www.theborderconsortium.org/wp-content/uploads/2024/05/3.-Book_Annual-report-2023_ENG-compressed.pdf.
- The Road to Civil War. (2022, 29 November). *Myanmar Witness*. <https://www.myanmarwitness.org/timeline/white-coat-protests>.
- Ullah, A. (n.d.). Etymology of Arakan & Rohingya. *Rohingya Culture Memory Center*. https://rohingyaculturalmemorycentre.iom.int/multimedia/files/pdf/download_area/Etymology_of_Arakan_and_Rohingya.pdf.
- UNHCR – Indonesia. (2023, 5 Desember). *14 Facts on Rohingya Refugees*. <https://www.unhcr.org/id/en/54315-14-facts-on-rohingya-refugees.html>.
- UNHCR. (2024). *Myanmar situation*. <https://reporting.unhcr.org/operational/situations/myanmar-situation>.
- United Nations. (2021, 26 Februari). *Myanmar Ambassador to UN denounces military coup, as envoy warns democratic processes have been ‘pushed aside’*. <https://news.un.org/en/story/2021/02/1085902>.
- United Nations. (2024, 24 Mei). *Myanmar: UN rights office warns of growing crisis in Rakhine state*. <https://news.un.org/en/story/2024/05/1150201>.

- US Committee for Refugees and Immigrants. (2024, 29 Februari). *Myanmar's Human Rights Crisis: In Freefall with Insufficient International Attention*. <https://refugees.org/myanmars-human-rights-crisis-in-freefall-with-insufficient-international-attention>.
- Wei, Z. (2022). The evolution of the 'QUAD': driving forces, impacts, and prospects. *China Int Strategy Rev.* 2022; 4(2): 288–304. DOI: 10.1007/s42533-022-00119-w.
- Who are the Rohingya? (2018, 18 April). *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/features/2018/4/18/who-are-the-rohingya>.
- Yusuf, I. (n.d.). Islam di Myanmar: Bacaan Pengantar. *Program Program Magister Agama dan Lintas Budaya - UGM*. <https://crcs.ugm.ac.id/islam-di-myanmar-bacaan-pengantar/>.



Etnis Rohingya di Myanmar telah menjadi perhatian dunia sejak lama. Meskipun mereka tinggal di sana selama beberapa generasi, pemerintah Myanmar tidak mengakuinya sebagai ras nasional. Myanmar memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1982 yang secara sewenang-wenang mencabut kewarganegaraan Rohingya dan melabeli mereka sebagai imigran ilegal Bengali. Oleh karena itu, mereka terkatung-katung di negeri kelahiran mereka sendiri tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Status itu membuat mereka menjadi korban pengusiran, penganiayaan, genosida, dan pelanggaran HAM lainnya oleh sistem yang dibangun pemerintah Myanmar.

Harapan sempat tumbuh ketika partai oposisi pro-demokrasi, yakni Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang salah satu pimpinannya adalah pemenang Nobel Perdamaian 1991, Aung San Suu Kyi, memenangkan pemilu 2015. Ternyata ketika oposisi yang “demokratis” memimpin, nasib Rohingya sama saja. Nasib mereka makin buruk setelah terjadi kudeta militer pada 1 Februari 2021 yang menimbulkan perang saudara.

Kudeta itu sendiri telah menimbulkan kekacauan di dalam negeri Myanmar. Parlemen hasil pemilu November 2020 membentuk Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) di luar negeri untuk menentang junta militer yang berkuasa pasca-kudeta. CRPH kemudian mendirikan pemerintahan National Unity Government of the Republic of the Union of Myanmar (NUG) di pengasingan.

Gagasan penyelesaian konflik internal di negara itu sudah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk ASEAN. DPR RI, terutama melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai alat kelengkapan DPR, juga menjalankan peran dan fungsi diplomasi parlemennya untuk ikut menyelesaikan konflik tersebut, antara lain, melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Namun, hingga kini belum bisa menyelesaikan konflik internal Myanmar. Dari sisi ASEAN terdapat kritik terhadap platform sentralitas ASEAN yang mengharuskan resolusi dan keputusan AIPA ditentukan secara konsensus. Kritik itu cukup tajam disampaikan parlemen Indonesia (BKSAP) agar membentuk format *voting*. Bagaimana masa depan Rohingya dan apa langkah yang sudah, akan, dan harus dilakukan BKSAP menyangkut krisis kemanusiaan yang menimpa Rohingya? Buku ini membahasnya dengan cukup komprehensif.

**Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
2024**

ISBN 978-602-8722-73-5 (PDF)

